



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan- yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 yang meliputi beberapa substansi pelaporana antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, untuk itu kami akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dalam

kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas dukungannya, kerjasamanya dan dengan telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Pelaihari, 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1.2 Struktur Organisasi	3
1.1.1.3 SDM Sekretariat Daerah	8
1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	12
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	17
1.1.2.1 Isu Strategis	17
1.1.2.2 Visi dan Misi	30
1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	34
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	64
1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	64
1.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	69
1.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	70
BAB III PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Penghargaan dan Inovasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 yang meliputi beberapa substansi pelaporan antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK* (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**) dan *Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

1.1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.1.1.2 Struktur Organisasi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati, **Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan Wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.** Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut NOMOR 114 TAHUN 2021 Pasal 4, Ayat 3 susunan Organisasi terdiri atas :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
- c. Bagian Organisasi; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
- 2) Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

- 1) Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2022 berdasarkan jabatan struktural dan non struktural berjumlah 246 orang yang terdiri 103 PNS dan 143 orang Non PNS, yang meliputi :

1.	Sekretaris Daerah	:	1 orang
2.	Asisten	:	3 orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	3 orang
4.	Kepala Bagian Umum	:	1 orang
5.	Kepala Bagian Organisasi	:	1 orang
6.	Kepala Bagian Hukum	:	1 orang
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1 orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Baranga/Jasa	:	1 orang
9.	Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	:	1 orang
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1 orang
11.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1 orang
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1 orang
13.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1 orang
14.	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga	:	1 orang
15.	Kasubbag Aset dan Perlengkapan	:	1 orang
16.	Kasubbag Protokol	:	1 orang
17.	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Peng. Barang/Jasa:	1 orang	
18.	JFT/JFU/Pelaksana	:	83 orang
19.	Non PNS	:	143 orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2022

NO	BAGIAN	GOLONGAN																
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten Sekda		3															3
3	Staf Ahli		2	1														3
4	Pemerintahan			1		3		1		2								7
5	Hukum			1		2	1	1	2									7
6	Organisasi			1		2		1	2									6
7	Pengadaan Barang/ Jasa				3	8	2	3	2	4								22
8	Perekonomian,Administrasi Pembangunan dan SDA				1	2	1		1									5
9	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	2	1								7
10	Umum				1	2	1	3	3	6	2	1	2	1	1			23
11	Perencanaan dan Keuangan			1		3			2	3								9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	3	2	2							11
JUMLAH		1	5	5	7	24	6	13	17	18	4	1	2	1	1	-	-	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

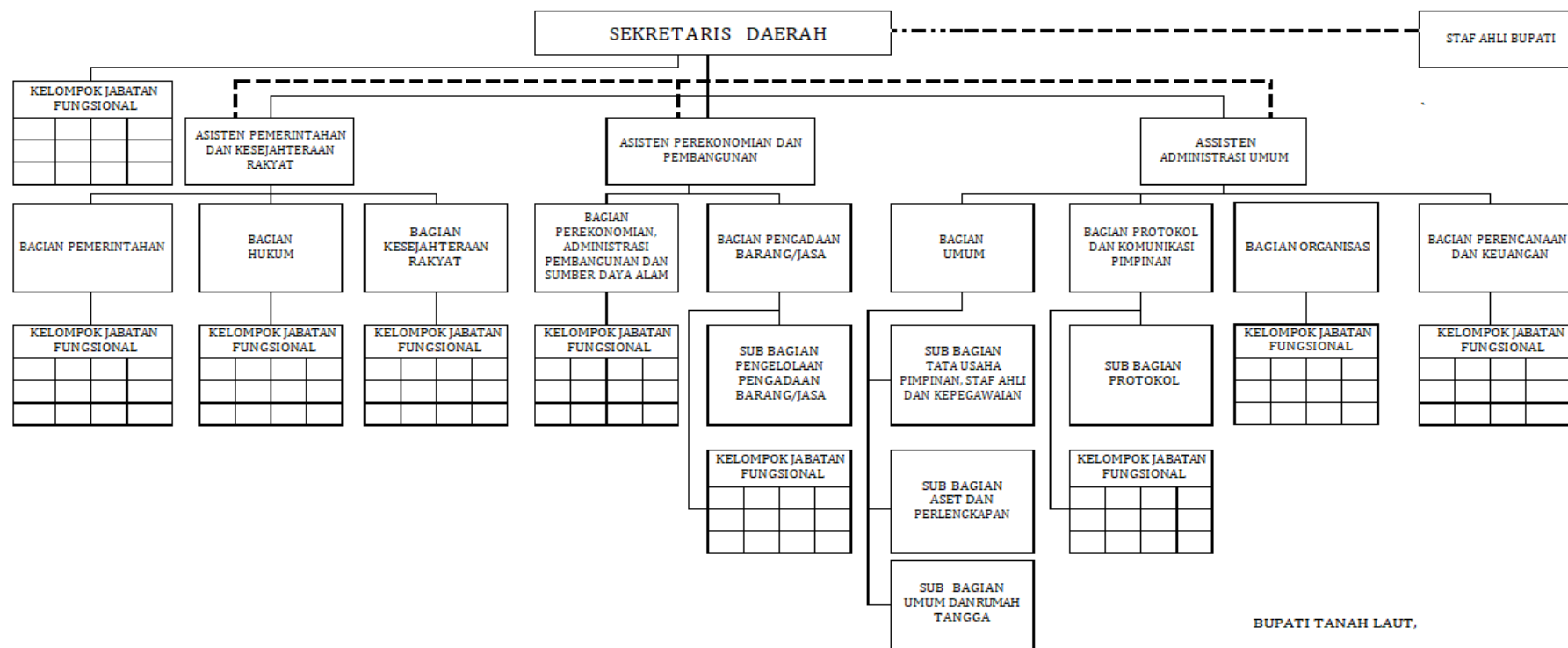
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda	1	2								3
3	Staf Ahli		1	2							3
4	Pemerintahan		2	3		1		1			7
5	Hukum		1	5		1					7
6	Organisasi			6							6
7	Pengadaan Barang/Jasa		2	15		4		1			22
8	Perekonomian,Administrasi Pembangunan dan SDA			3	1		1				5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			7
10	Umum			5		2		12	1	3	23
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	5			1	4			11
JUMLAH		1	14	50	-	12	1	22	1	3	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 114 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2021



KETERANGAN
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. Rp. 76.807.742.632,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 71.688.787.342,00** (Capaian 93%)

Tabel Anggaran Langsung dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah Tahun 2022

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	Rp. 1.630.548.804,00	Rp. 1.241.748.772,00	76%
2	Hukum	Rp. 1.483.907.058,00	Rp. 1.038.558.036,00	70%
3	Organisasi	Rp. 357.827.454,00	Rp. 272.899.875,00	76%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rp. 609.115.558,00	Rp. 553.292.900,00	91%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.027.842.586,00	Rp. 902.460.388,00	88%
6	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.780.351.961,00	Rp. 30.009.265.192,00	97%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.056.615.974,00	Rp. 986.485.397,00	93%
8	Umum	Rp. 17.340.073.924,00	Rp. 16.196.351.636,00	93%
9	Perencanaan dan Keuangan	Rp. 22.521.459.313,00	Rp. 20.487.725.146,00	91%
	JUMLAH	Rp. 76.807.742.632,00	Rp. 71.688.787.342,00	93%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan
 Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.307.185	10.039.362	7.917.500 (79%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710	10.349.710	8.168.400 (79%)	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	20.871.184.320	21.671.184.320	19.697.014.310 (91%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	8.999.745	8.999.745	8.141.300 (90%)	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	25.000.000	0%	Umum
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.000.000	82.000.000	3.850.000 (5%)	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	119.125.462	119.123.795	111.428.500 (94%)	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	157.879.941	136.285.050 (86%)	Umum
		- Penyedia Bahan Logistik Kantor	308.202.608	336.037.877	274.139.580 (82%)	Umum
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	84.759.206	96.363.449	90.657.000 (94%)	Umum
		- Penyedia Bahan/Material	30.000.000	39.980.000	18.000.000 (45%)	Umum
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	74.970.000	74.970.000	17.650.000 (24%)	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.024.600.000	2.951.250.000	2.914.160.260 (99%)	Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.925.104	828.019.412	756.491.358 (91%)	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.124.564	1.687.079.048	1.403.273.421 (83%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.280.000	528.530.500	441.292.000 (83%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	3.613.460.400	3.540.470.512 (98%)	Umum
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347	233.930.347	232.944.765 (100%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.546.656.019	1.806.241.019	1.801.801.915 (100%)	Umum
		- Pemelihara Mabel	20.000.000	20.000.000	17.910.000 (90%)	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	518.623.050	1.231.106.436	1.215.970.648 (99%)	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	286.525.200	374.525.200	348.396.500 (93%)	Umum
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176	820.886.176	766.483.636 (93%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500	94.486.500	93.300.000 (99%)	Umum
		- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	220.000.000	0%	Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	753.290.000	860.375.000	828.412.500 (96%)	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	560.675.000	657.555.000	655.336.000 (100%)	Umum
		- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	1.302.160.000	1.294.581.627 (99%)	Umum
		Kegiatan Penataan Organisasi				Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.231.862	117.226.852	78.260.873 (67%)	Organisasi
		- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	117.325.689	117.325.689	97.524.800 83%	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	110.474.913	123.274.913	97.114.202 (79%)	Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	189.708.730	299.706.344	283.644.476 (95%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	169.757.800	319.752.800	293.624.956 (92%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	205.532.676	437.156.830	409.215.965 (94%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	1.156.823.947	1.053.422.440	712.494.262 (68%)	Pemerintahan
		- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	229.980.000	290.131.000	264.455.080 (91%)	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	119.604.700	164.097.124	160.288.780 (98%)	Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah				Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	99.974.256	122.898.240	104.510.650 (85%)	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	7.042.116.816	7.042.116.816	7.015.702.900 (100%)	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	19.932.789.409	20.439.843.565	20.036.513.850 (98%)	Kesejahteraan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.087.584.707	3.298.391.580	2.957.048.442 (90%)	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum				Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	239.989.353	939.963.285	688.762.976 (73%)	Hukum
		- Fasilitas Bantuan Hukum	203.924.241	289.424.241	135.148.400 (47%)	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	156.790.808	254.519.532	214.646.660 (84%)	Hukum
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	99.839.150	241.839.150	199.106.900 (82%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	99.936.326	204.436.326	202.957.000 (99%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	117.240.082	162.840.082	151.229.000 (93%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	299.708.039	360.007.634	323.443.651 (90%)	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	227.412.584	281.683.800	261.865.500 (93%)	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	286.163.487	386.151.152	317.151.237 (82%)	Pengadaan Barang/Jasa

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

I. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 77.9** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
a.	SiRUP	10.00
b.	E-Tendering/E-Seleksi	4.80
c.	E-Purchasing	0.00
d.	Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing	4.80
e.	E-Kontrak	2.20
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16.20
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00
	TOTAL	77.90

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarkan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;
- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).

II. Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	9 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	15 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 11 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

III. Belum Maksimalnya Kinerja BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Memberikan Kontribusi PAD kepada Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang luas dalam mengembangkan dan mengelola kekayaan daerahnya dan dituntut

kemandiriannya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam sistem pemerintah daerah.

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa BUMD antara lain Perseroda PDAM Tanah Laut, PD Baratala, PT. BPR Tanah Laut dan PT. Tanah Laut Manuntung.

Kontribusi penerimaan masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut selama dua tahun terakhir mulai terlihat walaupun masih minim, kontribusi tersebut diberikan oleh PT. BPR Tanah Laut dan PD. Baratala Tuntung Pandang. Minimnya penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan BUMD disebabkan permasalahan – permasalahan antara lain :

- A. Kinerja masing-masing BUMD masih perlu ditingkatkan dengan menetapkan target yang wajar berdasarkan potensi riil dari masing-masing jasa usaha yang dikelola oleh masing-masing BUMD.

- B. Salah satu kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMD, antara lain jumlah pegawai yang terlalu banyak di setiap BUMD sehingga biaya umum dan administrasi setiap bulannya cukup besar (PDAM Tanah Laut).
- C. Belum optimalnya pengelolaan core bisnis dari masing-masing BUMD sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan yang diperoleh, target pendapatan yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada (PT. BPR Tanah Laut).
- D. Rendahnya kualitas BUMD juga mengakibatkan BUMD belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat pada tataran nasional, regional, maupun internasional.
- E. Belum dikelolanya BUMD dengan baik berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG)
- F. Masih terdapat satu BUMD yang belum dapat melaksanakan oprasional karena terkendla permodalan dan belum adanya organ kepengurusan yang definitif.

No	Nama BUMD	Jumlah PAD (Rp)		
		2020	2021	2022
1	PDAM Tanah Laut	-	-	-
2	PD. Baratala Tuntung pandang	379.934.000	479.277.000	650.000.000
3	PT. BPR Tanah Laut	-	106.000.000	462.000.000

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan dalam pengelolaan BUMD antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan diagnosis kemampuan organisasi BUMD tersebut dan bagaimana mengoperasikan organisasi tersebut secara efektif.
- 2) Mengkaji kekuatan atau kelemahan manajemen BUMD sebagai langkah awal dalam mendiagnosis organisasi, untuk mengetahui sejauh mana resources yang dimiliki BUMD tersebut untuk mendukung efektivitas strategi dan sejauh mana kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang potensial menghambat kinerja BUMD.
- 3) Menambah jumlah investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan barang
- 4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala
- 5) Memberikan pertimbangan kepada pihak manajemen, agar merekrut tenaga profesional yang kalau perlu bersifat part time atau kontrak guna mengatasi masalah SDM yang crucial, harus diakui bahwa kualitas SDM BUMD saat ini kebanyakan berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah.

- 6) Penetapan kembali core bisnis masing – masing BUMD, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif.
- 7) Memberikan saran untuk melakukan perbaikan koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir, memaksimalkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan, Bentuk kerja sama bisa berupa joint venture atau bentuk kerja sama lainnya.

IV. Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Gapura Karomah

Pelaksanaan program permodalan bagi pelaku usaha mikro berbiaya rendah Gapura Karomah sesuai dengan Perbup 176 tahun 2019 tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente untuk Ekonomi Lemah sudah memasuki tahap ke IV dengan total dana investasi yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. BPR Tanah Laut berjumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) telah di salurkan kepada 1.908 pelaku usaha mikro yang telah di verifikasi yang terbagi dalam 5 bidang usaha yaitu Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan dan Perindustrian.

NO	NAMA	JMLH	ORG	PLAFOND
1	PERTANIAN (1001)	938	ORG	9.457.690.000
2	PETERNAKAN (1001)	248	ORG	3.910.000.000
3	PERDAGANGAN (1007)	661	ORG	4.248.500.000
4	PERIKANAN (1002)	34	ORG	210.000.000
5	PERINDUSTRIAN (1004)	27	ORG	145.000.000
	JUMLAH	1908	ORG	17.971.190.000

Dalam pelaksanaannya banyak pelaku usaha mikro yang menggunakan fasilitas permodalan Gapura Karomah ini. Namun dalam proses pemberian kredit kepada debitur menemui banyak kendala dan permasalahan antara lain:

- a) Pihak penyalur yaitu Bank BPR Tanah Laut menerapkan ketentuan – ketentuan kredit perbankan sehingga cukup memakan waktu
- b) Para pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis

- c) Tingginya minat membuat daftar tunggu permohonan sangat panjang bahkan sampai satu tahun
- d) Keterbatasan anggaran investasi yang di salurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun kedua pelaksanaan program kredit Gapura Karomah di tahun 2020 terjadi bencana pandemi Covid 19 yang melanda Dunia tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut membuat tekanan yang negatif terhadap perekonomian Dunia, perekonomian Indonesia dan tentunya perekonomian di Tanah Laut dan berimbas terhadap perekonomian pelaku usaha mikro di Tanah Laut. Adanya pandemi covid ini membuat para debitur Gapura Karomah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan terjadinya kemacetan pengembalian dana kredit.

**LAPORAN KOLEKTIBILITAS KREDIT GAPURA KAROMAH 0%
 (nol persen)
 POSISI 30 DESEMBER 2022**

No	Kolektibilitas		Baki Debet Posisi	
			30 DESEMBER 2022	
1		2	3	4
1	768	Lancar	5.867.211.600	96,10%
2	-	Dalam Perhatian khusus		0,00%
3	-	Kurang Lancar		0,00%
4	-	Diragukan		0,00%
5	62	Macet	238.027.400	3,90%
	830	JUMLAH	6.105.239.000	3,90%

Dalam rangka antisipasi semakin banyaknya tingkat kemacetan akibat adanya pandemi covid 19, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA mengusulkan untuk perbup tentang fasilitas restrukturisasi untuk debitur gapura karomah yang mengalami penurunan ekonomi akibat adanya .pandemi covid 19. Jumlah debitur yang mengikuti program restrukturisasi kredit hingga 30 Desember 2022 berjumlah 42 orang dengan nilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Investasi Daerah terus mengawal progam ini dan berupaya agar pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro.

V. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan sebagai langkah telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), sistem pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, ada beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- 1) Manajemen Perubahan; sosialisasi dan internalisasi RB belum dilaksanakan secara terus menerus
- 2) Regulasi Kebijakan; Identifikasi dan analisis pemutkhiran pemetaan seluruh peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/sinkron belum dilaksanakan secara berkelanjutan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Tindak lanjut evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD belum maksimal
- 4) Penataan Tata Laksana; Belum disusunnya Peta Proses Bisnis Setda, SOP belum sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; Belum adanya review terhadap standar kompetensi jabatan PNS Setda dan kinerja individu belum dilakukan monev secara berkala
- 6) Penguatan Akuntabilitas; Belum terlibatnya pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen perencanaan
- 7) Penguatan Pengawasan;
 - Penerapan SPIP belum optimal
 - Monev pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala
 - Belum optimalnya penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- Belum maksimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi
- Belum maksimalnya penerapaaan budaya pelayanan prima

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya rencana tindak lanjut untuk menjamin perbaikan Program Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerahguna mendukung pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, rencana tindak lanjut dimaksud adalah sebagai berikut :

NO.	AREA PERUBAHAN RB	HASIL EVALUASI
1.	Manajemen Perubahan	a. Telah membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai Area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kinerja kearah yang lebih baik
2.	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan Indintifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan; b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan indentifikasi,analisa dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan Tokoh Masyarakat.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan kelembagaan berbasis kinerja; b. Evaluasi kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP; b. Penyusunan Draft Keputusan Peta Proses Bisnis; c. Penyusunan SOP sesuai Peta Proses Bisnis; d. Melakukan Evaluasi Peta Proses dan Penerapan SOP; e. Melakukan pemuktahiran data dan informasi publik.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; b. Melakukan Riviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; d. Reviu terhadap standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; e. Pemanfaatan system informasi kepegawaian; f. Melakukan monev kinerja individu secara berkala.
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Dokumen perencanaan ; b. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan SKPD dengan Kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal Terhadap Capaian Kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7.	Penguatan Pengawasan	a. Membangun komitmen anti Gratifikasi disetiap pelayanan; b. Melakukan identifikasi Risiko SKPD; c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan

		masyarakat melalui Aplikasi WBS; d. Meningkatkan Penanganan Pelaporan Benturan Kepentingan; e. Melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas untuk meraih WBK
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Evaluasi atas Pengembangan system informasi layanan masyarakat; b. Meningkatkan informassi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Meningkatkan nilai atas persepsi Kualitas Pelayanan Publik. d. Pengembangan Aplikasi Layanan untuk mempermudah pelayanan

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/161-LHE/Irban IV/Insp/2022 tanggal 10 Juni 2022 Hal Laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 33,61 (92,59%) dengan kategori AA (Istimewa), berikut ini disajikan tabel hasil penilaian mandiri Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL EVALUASI	
		Nilai	%
1	2	3	4
A	Aspek Pemenuhan		
1	Manajemen perubahan	1,96	98,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	100,00
4	Penata an Tatalaksana	0,83	83,00
5	Penataan Manajemen SDM	1,32	94,29
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	100,00
7	Penguatan Pengawasan	2,03	92,27
8	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	1,95	78,00
Jumlah		13,59	93,08
B	REFORM		
1	Manajemen Perubahan	3,00	100,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	100,00
4	Penataan Tatalaksana	3,26	86,93
5	Penataan Manajemen Sdm	1,25	62,50
6	Penguatan Akuntabilitas	3,41	90,93
7	Penguatan Pengawasan	1,85	94,87
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	100,00
JUMLAH		20,02	92,26
Total Jumlah Komponen Pengungkit		33,61	92,59

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah, maka diperlukan komitmen bersama antara Pimpinan dan jajarannya untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Disamping itu, selain komitmen bersama, pimpinan sebagai *role model* dapat menjadi panutan bagi PNS di Lingkup Sekretariat Daerah dengan membangun Nilai Budaya bagi seluruh Aparatur Sekretariat Daerah dalam bentuk slogan Budaya yaitu:

- **INTEGRITAS** dengan konsisten dalam setiap tindakan
- **PROFESIONAL** dalam melaksanakan tugas
- **AKUNTABEL** dengan sikap yang mampu mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan melaksanakan tugas

Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain dalam melaksanakan pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Memfasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 2) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 4) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 5) Memfasilitasi layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		kepada masyarakat luas; 6) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ; 7) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota; 8) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP; dan 9) Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
2.	Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Pemberian bantuan hibah bagi tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 2) Sosialisasi kelengkapan administrasi dan tata cara penyaluran dana; hibah daerah kepada pengurus tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hibah daerah untuk tempat ibadah dan lembaga/ organisasi keagamaan; 4) Fasilitasi kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan; 5) Pemberian insentif bagi guru-guru TPA, Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama; 6) Fasilitasi pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan bagi Penyuluh Agama; 7) Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji; 8) Fasilitasi pemberian bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama); 9) Fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ, Betamat Al Qur'an, Wisuda Santri, Hari Santri Nasional, MQK, PORSADIN, FASI dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama) bagi organisasi/lembaga keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 10) Pembinaan bagi lembaga/organisasi keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 11) Fasilitasi Tausiyah Keagamaan lingkup Sekretariat Daerah; 12) Fasilitasi pelaksanaan seleksi dan Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut; dan 13) Fasilitasi Penetapan Kepengurusan LPTQ, PHBI, Masjid Agung Syuhada dan PESPAWARI Kabupaten Tanah Laut.
3.	Pelayanan Bagian Pemerintahan	1) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah; 3) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD; 4) Fasilitasi Kegiatan <i>Coffe Morning</i>; 5) Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten; 6) Fasilitasi Penyusunan LKPJ/LPPD; 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; dan 8) Fasilitasi Administrasi Pimpinan dan PAW Anggota DPRD.
4.	Pelayanan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	1) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BUMD dengan Pemerintah Daerah; 2) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BLUD dengan Pemerintah Daerah; 3) Fasilitasi kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD; 4) Fasilitasi kegiatan penyusunan Kajian/Analisa Investasi Pemerintah Daerah;

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		5) Mengkoordinasikan kegiatan promosi produk unggulan daerah; 6) Mengkoordinasikan kegiatan penyaluran Kredit Modal Kerja Tanpa Bunga Program Gapura Karomah; 7) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait UMKM; 8) Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian lintas sektoral; 9) Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan pelaporan Administrasi Pembangunan; 10) Memfasilitasi kegiatan koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain); 11) Fasilitasi kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi; dan 12) Memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
5.	Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Memfasilitasi Protokoler Kegiatan Pimpinan; 2) Memfasilitasi Protokoler Tamu Daerah; 3) Memfasilitasi Pembuatan Viedo Pimpinan; 4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan; 5) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan; dan 6) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato.
6.	Pelayanan Bagian Hukum	1) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; 2) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan HAM; 3) Konsultasi dan Pengkajian Hukum; dan 4) Koreksi draft MoU, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Keperdataan lainnya.
7.	Pelayanan Bagian Umum	1) Memfasilitasi Penyewaan Gedung; 2) Memfasilitasi Penyewaan Bus; 3) Pelayanan Tamu Daerah; 4) Memberikan Pelayanan Surat Menyurat; 5) Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan 6) Memberikan Pelayanan dan Penyimpanan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.	Pelayanan Bagian Organisasi	1) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab; 4) Pendampingan Penyusunan SOTK dan Tupoksi/Uraian Tugas Jabatan SKPD; 5) Pembuatan ID Card Pegawai; 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 7) Fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 8) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).
9.	Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	1) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan Tunjangan Operasional Pimpinan; 2) Fasilitasi Pembayaran Pendapatan/Gaji dan TPP ASN Sekretariat Daerah; 3) Fasilitasi Penyusunan Renja Sekretariat Daerah; 4) Fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dan Keuangan; 5) Fasilitasi Penyusunan Manajemen Risiko; dan 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Diharapkan dengan layanan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-bagian dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik bagi masyarakat, instansi vertikal maupun untuk layanan Perangkat Daerah.

1.1.2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang **“BERINTERAKSI”**

- ❖ **Berkarya**
- ❖ **Inovasi**
- ❖ **Tertata**
- ❖ **Religius**
- ❖ **Aktual**
- ❖ **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta

mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang

semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahtraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang

berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi

bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan Organisasi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun untuk Renstra Tahun 2024-2026 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah :

1. Tujuan Strategis
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
 - b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
2. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Organisasi.
 - b. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh

Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim.

- c. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Adm. Pembanguann dan SDA, dan Bagian Pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel T-C. 25.

TABEL T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 - 2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81,5	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	100	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	
	Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta Administrasi Kewilayahan	Persentase kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
					Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan

				Meningkatnya Penyelenggaraa n Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kualitas penyelenggara n pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	10%	20%	30%	40%	50%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi

		Birokrasi										
					Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	
				Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Persentase kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100%	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	

	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Bagian Umum
					Peningkatan komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

	Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	100%	5%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	100%	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	Bagian Hukum

	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase kegiatan KDH/WKDH/SK PD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina	100%	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat

		Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat		Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Persentase penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	100%	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahna terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	80%	80%	85%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t		
									Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelum	Sesudah					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												69.255.985.112	70.405.976.540	####		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												36.856.107.207	38.018.594.842	#####		
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN												21.720.727.136	22.521.459.313			####					
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												19.656.895	20.389.072	117.668.012		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	76.61 ikm	76.61 ikm	2 Dokum en	2 Dokume n	100 Persen	100 Persen	9.307.185	10.039.362		Nilai IKM	76.61 ikm	67.668.012	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Laporan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan	76.61 ikm	76.61 ikm	4 Dokum en	4 Dokume n	100 Persen	100 Persen	10.349.710	10.349.710		Nilai IKM	76.61 ikm	50.000.000	

								Keuangan											
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20.880.184.065	21.680.184.065	####		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	Tersedianya Gaji dan TPP ASN	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	76.61 ikm	76.61 ikm	14 Bulan	14 Bulan	100 Persen	100 Persen	20.871.184.320	21.671.184.320	Nilai IKM	76.61 ikm	####
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Laporan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	76.61 ikm	76.61 ikm	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8.999.745	8.999.745	Nilai IKM	76.61 ikm	75.000.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										820.886.176	820.886.176	891.974.794		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IKM	Tersedianya Gaji dan Operasional KDH/WKDH	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum dan Keuangan	76,61 Nilai	76,61 Nilai	14 Bulan	14 Bulan	100 Persen	100 Persen	820.886.176	820.886.176	IKM	76,61 Nilai	891.974.794
BAGIAN UMUM															14.225.348.401	14.402.122.338	####		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										107.000.000	107.000.000	789.250.000		

4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	IKM	Jumlah Pemulangan Jenazah	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Kali	1 Kali	100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	IKM	76,61 Nilai	30.250.000
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM	Jumlah Kepesertaan/Bimbi Teknis	Persentase nCgaapnaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	3 Orang	3 Orang	100 Persen	100 Persen	82.000.000	82.000.000	IKM	76,61 Nilai	759.000.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.799.537.217	2.976.317.230	8.471.563.496		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	119.125.462	119.125.462	IKM	76,61 Nilai	150.475.963
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	157.879.941	157.879.941	IKM	76,61 Nilai	208.924.397
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM	Jumlah Bahan Logistik	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	308.202.608	308.200.645	IKM	76,61 Nilai	582.147.456
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	84.759.206	84.891.182	IKM	76,61 Nilai	187.405.680

4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM	Jenis Buku	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	0	IKM	76,61 Nilai	3.872.000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	IKM	Jumlah Pameran	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	6 Kali	6 Kali	100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	IKM	76,61 Nilai	296.604.000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM	Jumlah Orang	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	153 Orang	153 Orang	100 Persen	100 Persen	74.970.000	74.970.000	IKM	76,61 Nilai	164.934.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Jumlah honorarium Pengawasan Pimpinan Daerah Jumlah Perjalanan Dinas	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 orang 250 Orang	5 orang 250 Orang	100 Persen	100 Persen	2.024.600.000	2.201.250.000	IKM	76,61 Nilai	6.877.200.000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										426.925.104	426.925.104	4.633.659.789		
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	14 Jenis	14 Jenis	100 Persen	100 Persen	426.925.104	426.925.104	IKM	76,61 Nilai	4.633.659.789
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5.608.864.964	5.608.864.952	7.351.697.500		

4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM	Jumlah Belanja Air Jumlah Belanja Internet Jumlah Belanja Listrik Jumlah Belanja Telepon Jumlah TV Kabel	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 Persen	100 Persen	1.627.124.564	1.627.124.552	IKM	76,61 Nilai	2.207.610.614
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	368.280.000	368.280.000	IKM	76,61 Nilai	965.250.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM	Jumlah Orang	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	145 Orang	145 Orang	100 Persen	100 Persen	3.613.460.400	3.613.460.400	IKM	76,61 Nilai	4.178.836.886
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.605.734.616	2.605.728.552	5.756.991.755		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	233.930.347	233.930.347	IKM	76,61 Nilai	257.334.000

4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	109 Unit	109 Unit	100 Persen	100 Persen	1.546.656.019	1.546.649.955	IKM	76,61 Nilai	2.797.526.655
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	IKM	76,61 Nilai	25.500.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 Gedung	5 Gedung	100 Persen	100 Persen	518.623.050	518.623.050	IKM	76,61 Nilai	2.146.340.900
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	15 Jenis	15 Jenis	100 Persen	100 Persen	286.525.200	286.525.200	IKM	76,61 Nilai	530.290.200
4	01	01	2.11	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										314.486.500	314.486.500	346.060.000		

4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IKM	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum dan Keuangan	76,61 Nilai	76,61 Nilai	20 stel	20 stel	100 Persen	100 Persen	94.486.500	94.486.500	IKM	76,61 Nilai	104.060.000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	IKM	Jumlah Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum dan Keuangan	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun	1 Tahun	100 Persen	100 Persen	220.000.000	220.000.000	IKM	76,61 Nilai	242.000.000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										2.362.800.000	2.362.800.000	3.205.361.500		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	IKM	Jumlah Makan Minum KDH Jumlah Makan Tamu	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun 14158 orang	1 Tahun 14158 orang	100 Persen	100 Persen	753.290.000	753.290.000	IKM	76,61 Nilai	828.619.000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	IKM	Jumlah Makan Minum WKDH Jumlah Makan Tamu	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun 13009 orang	1 Tahun 13009 orang	100 Persen	100 Persen	560.675.000	560.675.000	IKM	76,61 Nilai	616.742.500
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	IKM	Jumlah Orang	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	42325 orang	42325 orang	100 Persen	100 Persen	1.048.835.000	1.048.835.000	IKM	76,61 Nilai	1.760.000.000
BAGIAN ORGANISASI															345.032.464	380.032.464			
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi										345.032.464	380.032.464	1.031.320.654		

4	0	0	2.	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai IKM	Jumlah SKPD yang memiliki analisis beban kerja Jumlah SKPD yang memiliki evaluasi jabatan Jumlah SKPD yang memiliki informasi jabatan Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas Jumlah SKPD yang memiliki standar kompetensi jabatan Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas yang telah di evaluasi sesuai aturan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Organisasi	76.61 ikm	76.61 ikm	40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD	40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD	100 Persen	100 Persen	117.231.862	117.231.862	Nilai IKM	76.61 ikm	375.000.00 0
---	---	---	----	---	---	-----------	--	---	--------------	--------------	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-----------	--------------	-----------------

4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai IKM	Jumlah Regulasi Standarisasi Pedoman Kerja Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Standart Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Organisasi	76.61 ikm	76.61 ikm	5 Perbup 5 SKPD 40 SKPD 3 Unit	5 Perbup/ SK 5 SKPD 40 SKPD 3 Unit	100 Persen	100 Persen	117.325.689	117.325.689	Nilai IKM	76.61 ikm	337.542.799
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai IKM	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014 Jumlah SKPD yang diasistensi terkait Laporan Kinerja Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Organisasi	76.61 ikm	76.61 ikm	40 SKPD 5 Dokumen 3 SKPD	1 Dokumen 40 SKPD 40 SKPD	100 Persen	100 Persen	110.474.913	145.474.913	Nilai IKM	76.61 ikm	318.777.855
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN															564.999.206	714.980.727			####

4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											564.999.206	714.980.727	2.371.321.315			
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai IKM	• Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya • Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	76.61 ikm	76.61 ikm	430 kali 28 kali	430 kali 28 kali	100 Persen	100 Persen	189.708.730	229.700.261		Nilai IKM	76.61 ikm	545.651.315	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai IKM	• Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti • Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi • Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH • Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	76.61 ikm	76.61 ikm	1 kali 280 kali 680 kali 680 berita	1 kali 280 kali 680 kali 680 berita	100 Persen	100 Persen	169.757.800	219.757.800		Nilai IKM	76.61 ikm	1.165.670.000	

4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Nilai IKM	• Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH • Jumlah pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	76.61 ikm	76.61 ikm	200 kali 300 kali	200 kali 300 kali	100 Persen	100 Persen	205.532.676	265.522.666		Nilai IKM	76.61 ikm	660.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										31.269.578.237	31.257.558.938	#####			
BAGIAN PEMERINTAHAN															1.606.382.903	1.570.487.021			####	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan										1.506.408.647	1.447.516.925	2.622.955.841			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Kegiatan koordinasi Forkopimda yang berhasil difasilitasi Jumlah Rapat Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintaha n	3,1250 Skor	3,1250 Skor	12 kali 50 Kali	8 kali 50 Kali	100 Persen	100 Persen	1.156.823.947	1.053.427.225		Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	2.257.820.796
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi Jumlah Penyelesaian Permasalahan pada kegiatan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintaha n	3,1250 Skor	3,1250 Skor	11 Kali 1 Dokum en	11 Kali 1 Dokume n	100 Persen	100 Persen	229.980.000	229.980.000		Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	193.747.862

4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokumen LKPJ yang terselesaikan Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintahan	3,1250 Skor	3,1250 Skor	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	119.604.700	164.109.700	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	171.387.183
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah										99.974.256	122.970.096	152.371.549		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak ketiga yang terselesaikan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintahan	3,1250 Skor	3,1250 Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	99.974.256	122.970.096	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	152.371.549
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															29.062.490.932	29.062.482.627	####		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										29.062.490.932	29.062.482.627	####		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	Kegiatan Lembaga / organisasi kemasyarakatan dan masyarakat	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	77 Skor	77 Skor	2 kali 76 buah	2 kali 115 buah	100 Persen	100 Persen	7.042.116.816	7.042.116.816	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	77 Skor	####
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	Kegiatan Pembayaran insentif bagi guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	77 Skor	77 Skor	3 kali 3290 orang	3 kali 3290 orang	100 Persen	100 Persen	19.932.789.409	20.221.705.929	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	77 Skor	####

4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Organisasi/lembaga keagamaan yang difasilitasi untuk kegiatan keagamaan Jumlah Pendidikan keagamaan yang di bina	Persentase aCapaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	77 Skor	77 Skor	10 Kegiatan 4 Lembaga 4 lembaga	10 Kegiatan 4 Lembaga 4 lembaga	100 Persen	100 Persen	2.087.584.707	1.798.659.882	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	77 Skor	5.151.011.718
BAGIAN HUKUM															600.704.402	624.589.290			####
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										600.704.402	624.589.290	636.755.655		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan Jumlah Produk Hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	100 %	100 %	19 Dokumen 200 Dokumen	19 Dokumen 200 Dokumen	100 Persen	100 Persen	239.989.353	239.989.353	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	266.738.288

4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Jumlah Kesepakatan bersama, Perjanjian Kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Jumlah masalah hukum yang di tangani	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	100 %	100 %	4 Kegiatan 400 Dokumen 4 Kasus	4 Kegiatan 400 Dokumen 4 Kasus	100 Persen	100 Persen	203.924.241	203.924.241	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	186.959.978
---	----	----	------	----	--------------------------	---	--	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	---	-------	-------------

4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut Jumlah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diterbitkan Jumlah Peserta yang menerima / mendapatkan sosialisasi / Penyuluhan Hukum Jumlah Registrasi dan Dokumentasi Produk Hukum	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	100 %	100 %	300 Eksempla 365 Hari 800 Dokumen 80 Orang 100 Persen	300 Eksempla 365 Hari 800 Dokumen 80 Orang 100 Persen	100 Persen	100 Persen	156.790.808	180.675.696	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	183.057.389
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										1.130.299.668	1.129.822.760	3.581.749.951		
BAGIAN PEREKONOMIAN															317.015.558	317.015.558			####
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										199.775.476	199.775.476	773.685.559		

4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Analisis Investasi Daerah Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BLUD Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BUMD	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	21 Dokumen	21 Dokumen	100 Persen	100 Persen	99.839.150	99.839.150	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	348.977.020
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	21 Dokumen	21 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	98.751.697

4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Fasilitas Promosi Daerah Dokumen Laporan Monev Pinjaman Tanpa Agunan dan Bunga 0%	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	99.936.326	99.936.326	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	325.956.842
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										117.240.082	117.240.082	746.462.598		

4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Administrasi Pembangunan Dokumen Laporan Tim Monev KUR Dokumen Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	11 Dokumen	11 Dokumen	100 Persen	100 Persen	117.240.082	117.240.082	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	746.462.598
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															813.284.110	812.807.202			####
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										813.284.110	812.807.202	2.061.601.794		

4	0 1	0 3	2. 0 3	0 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah paket yang diproses dalam kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu Jumlah SKPD yang difasilitasi dan didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	150 Paket 40 SKPD	150 Paket 40 SKPD	100 Persen	100 Persen	299.708.039	299.708.039	Persentase pelaksanaa n pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 perse n	1.238.289.1 61
4	0 1	0 3	2. 0 3	0 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur Jumlah Paket Pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	4 aplikasi 150 Paket	4 aplikasi 150 Paket	100 Persen	100 Persen	227.412.584	226.940.676	Persentase pelaksanaa n pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 perse n	356.135.90 2

4	013	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah Fasilitas Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Fasilitas pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	40 SKPD 25 Orang	40 SKPD 25 Orang	100 Persen	100 Persen	286.163.487	286.158.487	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 persen	467.176.731
TOTAL														69.255.985.112	70.405.976.540	####		

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022, hal tersebut d iatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon II Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	90.44	111%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	1000%
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,125	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	100	111,11%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	100	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Total				216%

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon III Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-1 "Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya"
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3: "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%	
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	75%	75%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	
7	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	95%	95%	
8	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil	100%	100%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ditindaklanjuti				
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	90%	97,5%	108,33%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik <i>(Good Governance)</i> ”
10	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan minimal 60	40%	100%	250%	
11	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	
12	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	90%	90%	
13	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik <i>(Good Governance)</i> ”
14	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	
16	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	110%	110%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik <i>(Good Governance)</i> ”
17	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	85%	117%	142.6%	
18	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	
19	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	5%	8.95%	179%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
21	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	
22	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	
23	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 78,4	104,5%	
24	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	0%	0%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	100%	0%	0%	
25	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	76.67%	76.67%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
26	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	93.63%	93.63%	
27	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	89.65%	89.65%	
28	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100 %	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 “Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan
29	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”
31	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon IV Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKP D/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKP D dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.000 Jenis	81%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan Perlengkapan
7	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260 Kali	104%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sekretariat Daerah					
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	270 Kali	108%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.407 Surat	97%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	126 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
12	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	112 Dokumen	116%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
13	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	165 Paket	110%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
14	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
15	Kegiatan keprotokolkan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kasubbag Protokol
16	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kasubbag Protokol

1.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Capaian Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

1.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Untuk Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022 DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD		CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	kontrak	0	Tidak ada kontrak konstruksi di atas 50 Milyar Rupiah
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022	1601 Kontrak		
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	<u>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</u> Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (> 50 Juta)	1601 paket	36,01	Data diambil dari sirup.lkpp.go.id
			Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif (≤ 50 Juta)	4446 paket		
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	<u>Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan</u> Total belanja langsung	Jumlah nilai langsung yang melalui pengadaan	883,641,136,968.81	57.52	
			Total belanja langsung	1,536,126,753,030.18		

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LKPj kepada DPRD telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, atas Laporan kemajuan yang telah dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menciptakan tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Sekretariat Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, yang dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2022.

2. Penghargaan dan Inovasi

Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan (Predikat BAIK) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

NO	NILAI ITKP		PENINGKATAN
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	73,94	77,9	3,99

2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanah Laut Mendapatkan Indeks 4,52 Kategori (A) .

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
57	Kota Batam	4,53	A
58	Kabupaten Banyuwani	4,53	A
59	Kabupaten Karawang	4,53	A
60	Kota Mojokerto	4,53	A
61	Kota Singkawang	4,53	A
62	Kota Balikpapan	4,53	A
63	Kabupaten Cilacap	4,53	A
64	Kabupaten Batang	4,53	A
65	Kabupaten Karanganyar	4,53	A
66	Kabupaten Pati	4,53	A
67	Kabupaten Barru	4,53	A
68	Kota Sawahlunto	4,52	A
69	Kabupaten Musi Banyuwasin	4,52	A
70	Kota Tasikmalaya	4,52	A
71	Kabupaten Bojonegoro	4,52	A
72	Kabupaten Tanah Laut	4,52	A
73	Kabupaten Blora	4,52	A
74	Kabupaten Sukoharjo	4,52	A
75	Kota Cimahi	4,52	A

3) Penghargaan sebagai UKPBJ Kabupaten/Kota Pertama yang mencapai Level 3 dari Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Tanah Laut berada pada **Zonasi Hijau** Nilai Kepatuhan **86.61** Kategori **A**

No	Kabupaten	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
42.	Gunung Kidul	88.97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Jepara	88.79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Solok	88.73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Dharmasraya	88.67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Kulon Progo	88.61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Tangerang	88.54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Ogan Ilir	88.40	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Semarang	88.27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50.	Banjarnegara	88.20	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51.	Tanah Datar	88.11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52.	Bovolali	88.03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53.	Langkat	87.80	Hijau	B	Kualitas Tinggi
54.	Aceh Selatan	87.74	Hijau	B	Kualitas Tinggi
55.	Tanjung Jabung Timur	87.43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
56.	Kerinci	87.31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
57.	Lingga	87.27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
58.	Tapamuli Selatan	87.20	Hijau	B	Kualitas Tinggi
59.	Batu Bera	86.62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
60.	Tanah Laut	86.61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
61.	Banggai	86.11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
62.	Magelang	85.98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
63.	Kepahiang	85.97	Hijau	B	Kualitas Tinggi
64.	Aceh Barat Daya	85.85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
65.	Mamuju Tengah	85.55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
66.	Sanggau	85.52	Hijau	B	Kualitas Tinggi
67.	Seluma	85.51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
68.	Aceh Singkil	85.37	Hijau	B	Kualitas Tinggi
69.	Ngawi	85.36	Hijau	B	Kualitas Tinggi
70.	Nias	85.05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
71.	Klaten	85.00	Hijau	B	Kualitas Tinggi

5) Penghargaan Digital Inovasi Award (DIA) Kategori Digital In
Innovation For Public Service untuk Aplikasi Sosialita

Pelaihari, 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan- yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 yang meliputi beberapa substansi pelaporana antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dan sekaligus menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara objektif dan menyeluruh atas kinerja Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanah Laut khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini masih terdapat kekurangan baik dalam metode penyajian maupun dalam kelengkapan datanya, untuk itu kami akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Dalam

kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut atas dukungannya, kerjasamanya dan dengan telah bekerja maksimal menyelesaikan penyusunan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022.

Pelaihari, 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.1.1 Dasar Hukum	1
1.1.1.2 Struktur Organisasi	3
1.1.1.3 SDM Sekretariat Daerah	8
1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	12
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	17
1.1.2.1 Isu Strategis	17
1.1.2.2 Visi dan Misi	30
1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	34
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	64
1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	64
1.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	69
1.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	70
BAB III PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Penghargaan dan Inovasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan peraturan. Selain itu, laporan ini juga memuat prestasi dan keberhasilan yang telah di raih dan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Sekretariat Daerah. Prestasi atau keberhasilan tersebut memacu Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih baik. Sedangkan permasalahan yang merupakan kelemahan-kelemahan di pergunakan sebagai evaluasi perbaikan untuk langkah ke depan.

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyusunan laporan LKPJ dan LPPD Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dituangkan dalam DPA Tahun Anggaran 2022 yang meliputi beberapa substansi pelaporan antara lain Dasar Hukum, Gambaran umum Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah yang mencakup Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, Prioritas Daerah.

Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values ASN BerAKHLAK* (**Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**) dan *Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa*, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Sekretariat Daerah dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Sekretariat Daerah.

1.1.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 - 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.1.1.2 Struktur Organisasi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Bupati dan didampingi seorang Wakil Bupati, **Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukamta dengan Wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.** Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut NOMOR 114 TAHUN 2021 Pasal 4, Ayat 3 susunan Organisasi terdiri atas :

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum Daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, dan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengawasi di bidang umum, organisasi, protokol, dan komunikasi pimpinan serta perencanaan dan keuangan;
- f. Perumusan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan wewenangnya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi Umum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

- a. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang terdiri atas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Asisten Administrasi Umum, membawahi:

- a. Bagian Umum, yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri atas Sub Bagian Protokol;
- c. Bagian Organisasi; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat melalui:

- 1) Bagian Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah.
- 2) Bagian Hukum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan pembentukan produk hukum penetapan, dokumentasi dan informasi hukum.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan budaya serta kesejahteraan masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian administrasi pembangunan dan sumber daya alam dan pengadaan barang/jasa melalui:

- 1) Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam** mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam;
- 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

(3) Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, organisasi, dan perencanaan dan keuangan melalui:

- 1) Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian, Aset Perlengkapan Serta Umum dan Rumah Tangga;
- 2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
- 3) Bagian Organisasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah.

- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.1.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah

Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada akhir Tahun 2022 berdasarkan jabatan struktural dan non struktural berjumlah 246 orang yang terdiri 103 PNS dan 143 orang Non PNS, yang meliputi :

1.	Sekretaris Daerah	:	1 orang
2.	Asisten	:	3 orang
3.	Staf Ahli Bupati	:	3 orang
4.	Kepala Bagian Umum	:	1 orang
5.	Kepala Bagian Organisasi	:	1 orang
6.	Kepala Bagian Hukum	:	1 orang
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	1 orang
8.	Kepala Bagian Pengadaan Baranga/Jasa	:	1 orang
9.	Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	:	1 orang
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	:	1 orang
11.	Kepala Bagian Pemerintahan	:	1 orang
12.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	:	1 orang
13.	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	:	1 orang
14.	Kasubbag Umum dan Rumah Tangga	:	1 orang
15.	Kasubbag Aset dan Perlengkapan	:	1 orang
16.	Kasubbag Protokol	:	1 orang
17.	Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Peng. Barang/Jasa:	1 orang	
18.	JFT/JFU/Pelaksana	:	83 orang
19.	Non PNS	:	143 orang

Sedangkan susunan kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Kualifikasi Pendidikan
per 31 Desember 2022

NO	BAGIAN	GOLONGAN																
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Sekretaris Daerah	1																1
2	Asisten Sekda		3															3
3	Staf Ahli		2	1														3
4	Pemerintahan			1		3		1		2								7
5	Hukum			1		2	1	1	2									7
6	Organisasi			1		2		1	2									6
7	Pengadaan Barang/ Jasa				3	8	2	3	2	4								22
8	Perekonomian,Administrasi Pembangunan dan SDA				1	2	1		1									5
9	Kesejahteraan Rakyat				1	2		1	2	1								7
10	Umum				1	2	1	3	3	6	2	1	2	1	1			23
11	Perencanaan dan Keuangan			1		3			2	3								9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan				1		1	2	3	2	2							11
JUMLAH		1	5	5	7	24	6	13	17	18	4	1	2	1	1	-	-	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

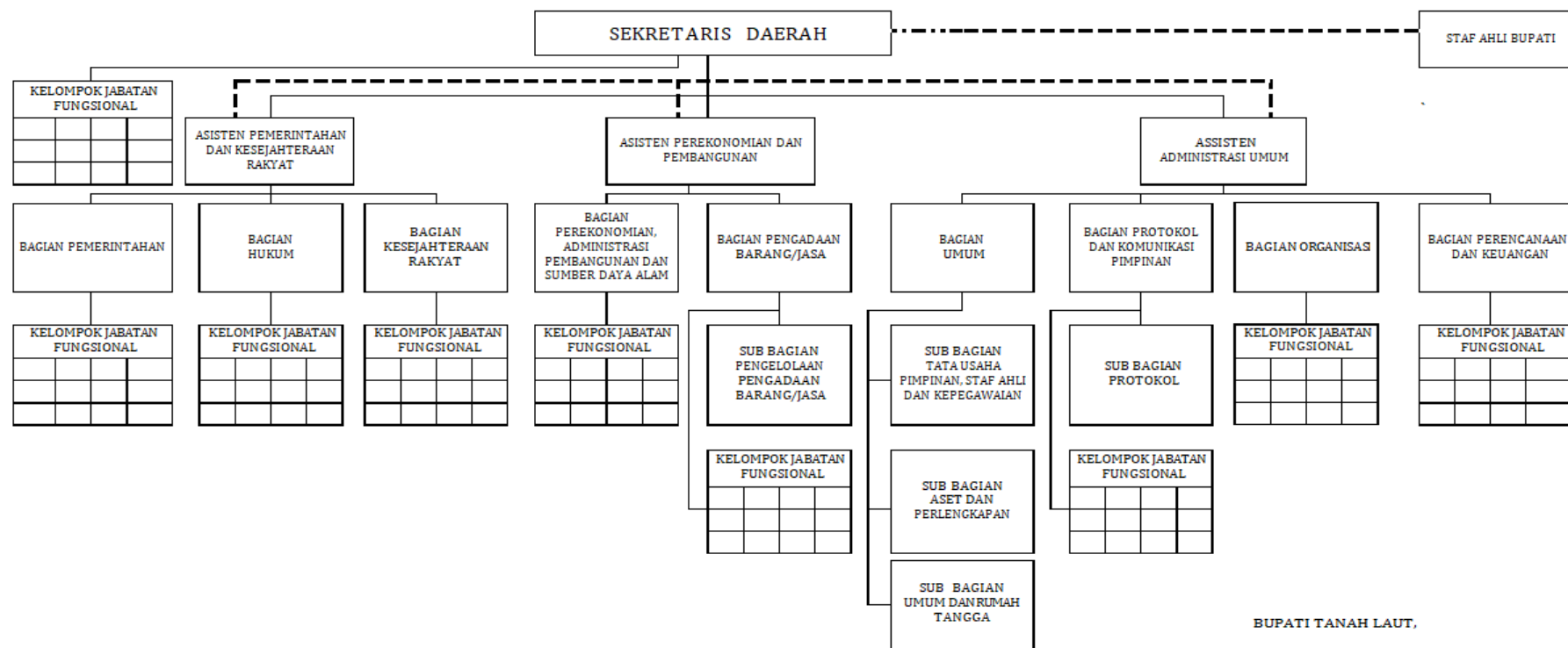
Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

NO	BAGIAN	PENDIDIKAN									
		S3	S2	S1	DIV	D3	D2	SMU	SMP	SD	JUMLAH
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sekretaris Daerah		1								1
2	Asisten Sekda	1	2								3
3	Staf Ahli		1	2							3
4	Pemerintahan		2	3		1		1			7
5	Hukum		1	5		1					7
6	Organisasi			6							6
7	Pengadaan Barang/Jasa		2	15		4		1			22
8	Perekonomian,Administrasi Pembangunan dan SDA			3	1		1				5
9	Kesejahteraan Rakyat		1	3		2		1			7
10	Umum			5		2		12	1	3	23
11	Perencanaan dan Keuangan			5		1		3			9
12	Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1	5			1	4			11
JUMLAH		1	14	50	-	12	1	22	1	3	104

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 114 TAHUN 2021
 TANGGAL : 13 DESEMBER 2021



KETERANGAN
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI TANAH LAUT,
 Ttd
 H. SUKAMTA

1.1.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. Rp. 76.807.742.632,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 71.688.787.342,00** (Capaian 93%)

Tabel Anggaran Langsung dan Realisasi APBD Sekretariat Daerah Tahun 2022

NO	BAGIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintahan	Rp. 1.630.548.804,00	Rp. 1.241.748.772,00	76%
2	Hukum	Rp. 1.483.907.058,00	Rp. 1.038.558.036,00	70%
3	Organisasi	Rp. 357.827.454,00	Rp. 272.899.875,00	76%
4	Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Rp. 609.115.558,00	Rp. 553.292.900,00	91%
5	Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.027.842.586,00	Rp. 902.460.388,00	88%
6	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.780.351.961,00	Rp. 30.009.265.192,00	97%
7	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.056.615.974,00	Rp. 986.485.397,00	93%
8	Umum	Rp. 17.340.073.924,00	Rp. 16.196.351.636,00	93%
9	Perencanaan dan Keuangan	Rp. 22.521.459.313,00	Rp. 20.487.725.146,00	91%
	JUMLAH	Rp. 76.807.742.632,00	Rp. 71.688.787.342,00	93%

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 ini dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung Tupoksi Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Anggaran APBD Murni dan APBD Perubahan
Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.307.185	10.039.362	7.917.500 (79%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.349.710	10.349.710	8.168.400 (79%)	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	20.871.184.320	21.671.184.320	19.697.014.310 (91%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	8.999.745	8.999.745	8.141.300 (90%)	Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Umum
		- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	25.000.000	25.000.000	0%	Umum
		- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	82.000.000	82.000.000	3.850.000 (5%)	Umum
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Umum
		- Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	119.125.462	119.123.795	111.428.500 (94%)	Umum
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.879.941	157.879.941	136.285.050 (86%)	Umum
		- Penyedia Bahan Logistik Kantor	308.202.608	336.037.877	274.139.580 (82%)	Umum
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	84.759.206	96.363.449	90.657.000 (94%)	Umum
		- Penyedia Bahan/Material	30.000.000	39.980.000	18.000.000 (45%)	Umum
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	74.970.000	74.970.000	17.650.000 (24%)	Umum
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.024.600.000	2.951.250.000	2.914.160.260 (99%)	Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.925.104	828.019.412	756.491.358 (91%)	Umum
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.627.124.564	1.687.079.048	1.403.273.421 (83%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.280.000	528.530.500	441.292.000 (83%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.613.460.400	3.613.460.400	3.540.470.512 (98%)	Umum
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.930.347	233.930.347	232.944.765 (100%)	Umum
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.546.656.019	1.806.241.019	1.801.801.915 (100%)	Umum
		- Pemelihara Mabel	20.000.000	20.000.000	17.910.000 (90%)	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	518.623.050	1.231.106.436	1.215.970.648 (99%)	Umum
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	286.525.200	374.525.200	348.396.500 (93%)	Umum
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Perencanaan dan Keuangan dan Umum
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	820.886.176	820.886.176	766.483.636 (93%)	Perencanaan dan Keuangan
		- Penyedia Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	94.486.500	94.486.500	93.300.000 (99%)	Umum
		- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.000.000	220.000.000	0%	Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	753.290.000	860.375.000	828.412.500 (96%)	Umum
		- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	560.675.000	657.555.000	655.336.000 (100%)	Umum
		- Penyedia Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.048.835.000	1.302.160.000	1.294.581.627 (99%)	Umum
		Kegiatan Penataan Organisasi				Organisasi
		- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	117.231.862	117.226.852	78.260.873 (67%)	Organisasi
		- Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	117.325.689	117.325.689	97.524.800 83%	Organisasi
		- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	110.474.913	123.274.913	97.114.202 (79%)	Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Keprotokolan	189.708.730	299.706.344	283.644.476 (95%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	169.757.800	319.752.800	293.624.956 (92%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	205.532.676	437.156.830	409.215.965 (94%)	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan				Pemerintahan
		- Penataan Administrasi Pemerintahan	1.156.823.947	1.053.422.440	712.494.262 (68%)	Pemerintahan
		- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	229.980.000	290.131.000	264.455.080 (91%)	Pemerintahan
		- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	119.604.700	164.097.124	160.288.780 (98%)	Pemerintahan
		Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah				Pemerintahan
		- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	99.974.256	122.898.240	104.510.650 (85%)	Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Kesejahteraan Rakyat
		- Fasilitas Pengelolaan Bina Metal Spritual	7.042.116.816	7.042.116.816	7.015.702.900 (100%)	Kesejahteraan Rakyat
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	19.932.789.409	20.439.843.565	20.036.513.850 (98%)	Kesejahteraan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.087.584.707	3.298.391.580	2.957.048.442 (90%)	Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum				Hukum
		- Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	239.989.353	939.963.285	688.762.976 (73%)	Hukum
		- Fasilitas Bantuan Hukum	203.924.241	289.424.241	135.148.400 (47%)	Hukum
		- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	156.790.808	254.519.532	214.646.660 (84%)	Hukum
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	99.839.150	241.839.150	199.106.900 (82%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	99.936.326	204.436.326	202.957.000 (99%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	117.240.082	162.840.082	151.229.000 (93%)	Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	299.708.039	360.007.634	323.443.651 (90%)	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	227.412.584	281.683.800	261.865.500 (93%)	Pengadaan Barang/Jasa
		- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	286.163.487	386.151.152	317.151.237 (82%)	Pengadaan Barang/Jasa

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.2.1 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah antara lain sebagai berikut :

I. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem pengadaan guna mendapatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik sebagai Aspek Indikator Antara Dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) disebutkan bahwa ITKP minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
 - b. *E-Tendering/E-Seleksi*;
 - c. *E-Purchasing*;
 - d. *Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing*; dan
 - e. E-Kontrak.
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.
3. Tingkat Kematangan UKPBJ.

Nilai ITKP minimal BAIK ini akan berpengaruh terhadap Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh penilaian dengan **bobot 77.9** dengan predikat **BAIK**. Adapun nilai pembobotan per *item* penilaian yaitu :

NO	PENILAIAN INDIKATOR	NILAI BOBOT
1.	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	
a.	SiRUP	10.00
b.	E-Tendering/E-Seleksi	4.80
c.	E-Purchasing	0.00
d.	Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing	4.80
e.	E-Kontrak	2.20
2.	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	16.20
3.	Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00
	TOTAL	77.90

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa salah satu **isu strategis Bagian PBJ** adalah pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku pengadaan guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut sebagai aspek indikator ANTARA dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun langkah yang akan dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa guna menaikkan nilai ITKP Kab. Tanah Laut di Tahun 2023 yaitu :

- Membuat Surat Edaran untuk disebarkan ke SKPD guna pemenuhan Data ITKP;
- Melaksanakan pendampingan ke SKPD untuk pemanfaatan sistem pengadaan;
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan sistem pengadaan di SKPD (setiap triwulan).

II. **Belum terpenuhinya Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi dari LKPP**

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah organisasi lembaga dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, organisasi lembaga akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi.

Berdasarkan Jumlah eksisting, ketersediaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kab. Tanah Laut saat ini adalah :

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	JF PPBJ Pertama	4 orang
2.	JF PPBJ Muda	9 orang
3.	JF PPBJ Madya	2 orang
	Total	15 orang

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Berdasarkan surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 10197/D.3.1/05/2021 Perihal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, disampaikan bahwa Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut yg disampaikan LKPP RI terkait usulan perhitungan kebutuhan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Laut, yaitu :

NO	Nama Jabatan	Rekomendasi Instansi Pembina
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	14
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	3
	TOTAL	26

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022*

Dari paparan kedua tabel di atas maka diketahui bahwa masih terdapat kekurangan formasi JF PPBJ sebanyak 11 orang.

Untuk itu maka, Bagian Pengadaan Barang/Jasa berusaha mengusulkan kepada Bupati Tanah Laut untuk dapat memenuhi formasi JF PPBJ tersebut sesuai dengan jumlah yang ditentukan dengan cara pembukaan formasi pada penerimaan CPNS untuk Kabupaten Tanah Laut atau memfasilitasi melalui perpindahan dari jabatan lain ke JF PPBJ.

III. Belum Maksimalnya Kinerja BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dalam Memberikan Kontribusi PAD kepada Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh kewenangan yang luas dalam mengembangkan dan mengelola kekayaan daerahnya dan dituntut

kemandiriannya terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam system pemerintahan mendasar dalam sistem pemerintah daerah.

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Pada sisi lain BUMD juga diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan untuk tetap mandiri dan mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Konsekuensinya BUMD menjadi penopang yang cukup besar dalam meningkatkan PAD.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa BUMD antara lain Perseroda PDAM Tanah Laut, PD Baratala, PT. BPR Tanah Laut dan PT. Tanah Laut Manuntung.

Kontribusi penerimaan masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut selama dua tahun terakhir mulai terlihat walaupun masih minim, kontribusi tersebut diberikan oleh PT. BPR Tanah Laut dan PD. Baratala Tuntung Pandang. Minimnya penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan BUMD disebabkan permasalahan – permasalahan antara lain :

- A. Kinerja masing-masing BUMD masih perlu ditingkatkan dengan menetapkan target yang wajar berdasarkan potensi riil dari masing-masing jasa usaha yang dikelola oleh masing-masing BUMD.

- B. Salah satu kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMD, antara lain jumlah pegawai yang terlalu banyak di setiap BUMD sehingga biaya umum dan administrasi setiap bulannya cukup besar (PDAM Tanah Laut).
- C. Belum optimalnya pengelolaan core bisnis dari masing-masing BUMD sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan yang diperoleh, target pendapatan yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada (PT. BPR Tanah Laut).
- D. Rendahnya kualitas BUMD juga mengakibatkan BUMD belum siap menghadapi persaingan yang cukup ketat pada tataran nasional, regional, maupun internasional.
- E. Belum dikelolanya BUMD dengan baik berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG)
- F. Masih terdapat satu BUMD yang belum dapat melaksanakan oprasional karena terkendla permodalan dan belum adanya organ kepengurusan yang definitif.

No	Nama BUMD	Jumlah PAD (Rp)		
		2020	2021	2022
1	PDAM Tanah Laut	-	-	-
2	PD. Baratala Tuntung pandang	379.934.000	479.277.000	650.000.000
3	PT. BPR Tanah Laut	-	106.000.000	462.000.000

Adapun beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA dalam menyikapi permasalahan dalam pengelolaan BUMD antara lain :

- 1) Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan diagnosis kemampuan organisasi BUMD tersebut dan bagaimana mengoperasikan organisasi tersebut secara efektif.
- 2) Mengkaji kekuatan atau kelemahan manajemen BUMD sebagai langkah awal dalam mendiagnosis organisasi, untuk mengetahui sejauh mana resources yang dimiliki BUMD tersebut untuk mendukung efektivitas strategi dan sejauh mana kelemahan-kelemahan yang dimiliki yang potensial menghambat kinerja BUMD.
- 3) Menambah jumlah investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal berupa uang dan barang
- 4) Melakukan evaluasi kinerja secara berkala
- 5) Memberikan pertimbangan kepada pihak manajemen, agar merekrut tenaga profesional yang kalau perlu bersifat part time atau kontrak guna mengatasi masalah SDM yang crucial, harus diakui bahwa kualitas SDM BUMD saat ini kebanyakan berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah.

- 6) Penetapan kembali core bisnis masing – masing BUMD, likuidasi unit usaha yang selalu merugi. Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efisien dan efektif.
- 7) Memberikan saran untuk melakukan perbaikan koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir, memaksimalkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan, Bentuk kerja sama bisa berupa joint venture atau bentuk kerja sama lainnya.

IV. Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Gapura Karomah

Pelaksanaan program permodalan bagi pelaku usaha mikro berbiaya rendah Gapura Karomah sesuai dengan Perbup 176 tahun 2019 tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente untuk Ekonomi Lemah sudah memasuki tahap ke IV dengan total dana investasi yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada PT. BPR Tanah Laut berjumlah Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) telah di salurkan kepada 1.908 pelaku usaha mikro yang telah di verifikasi yang terbagi dalam 5 bidang usaha yaitu Pertanian, Peternakan, Perdagangan, Perikanan dan Perindustrian.

NO	NAMA	JMLH	ORG	PLAFOND
1	PERTANIAN (1001)	938	ORG	9.457.690.000
2	PETERNAKAN (1001)	248	ORG	3.910.000.000
3	PERDAGANGAN (1007)	661	ORG	4.248.500.000
4	PERIKANAN (1002)	34	ORG	210.000.000
5	PERINDUSTRIAN (1004)	27	ORG	145.000.000
	JUMLAH	1908	ORG	17.971.190.000

Dalam pelaksanaannya banyak pelaku usaha mikro yang menggunakan fasilitas permodalan Gapura Karomah ini. Namun dalam proses pemberian kredit kepada debitur menemui banyak kendala dan permasalahan antara lain:

- a) Pihak penyalur yaitu Bank BPR Tanah Laut menerapkan ketentuan – ketentuan kredit perbankan sehingga cukup memakan waktu
- b) Para pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis

- c) Tingginya minat membuat daftar tunggu permohonan sangat panjang bahkan sampai satu tahun
- d) Keterbatasan anggaran investasi yang di salurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun kedua pelaksanaan program kredit Gapura Karomah di tahun 2020 terjadi bencana pandemi Covid 19 yang melanda Dunia tidak terkecuali di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut membuat tekanan yang negatif terhadap perekonomian Dunia, perekonomian Indonesia dan tentunya perekonomian di Tanah Laut dan berimbas terhadap perekonomian pelaku usaha mikro di Tanah Laut. Adanya pandemi covid ini membuat para debitur Gapura Karomah mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya yang menyebabkan terjadinya kemacetan pengembalian dana kredit.

**LAPORAN KOLEKTIBILITAS KREDIT GAPURA KAROMAH 0%
 (nol persen)
 POSISI 30 DESEMBER 2022**

No	Kolektibilitas		Baki Debet Posisi	
			30 DESEMBER 2022	
1		2	3	4
1	768	Lancar	5.867.211.600	96,10%
2	-	Dalam Perhatian khusus		0,00%
3	-	Kurang Lancar		0,00%
4	-	Diragukan		0,00%
5	62	Macet	238.027.400	3,90%
	830	JUMLAH	6.105.239.000	3,90%

Dalam rangka antisipasi semakin banyaknya tingkat kemacetan akibat adanya pandemi covid 19, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian, Adm Pembangunan dan SDA mengusulkan untuk perbup tentang fasilitas restrukturisasi untuk debitur gapura karomah yang mengalami penurunan ekonomi akibat adanya .pandemi covid 19. Jumlah debitur yang mengikuti program restrukturisasi kredit hingga 30 Desember 2022 berjumlah 42 orang dengan nilai Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Tim Investasi Daerah terus mengawal progam ini dan berupaya agar pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian para pelaku usaha mikro.

V. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan sebagai langkah telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019-2023.

Reformasi Birokrasi yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), sistem pengelolaan keuangan, manajemen kepegawaian, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Daerah belum optimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan terbatasnya kompetensi SDM untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi tersebut.

Sampai saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah belum dilaksanakan secara optimal, ada beberapa komponen Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang belum dilaksanakan, hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

- 1) Manajemen Perubahan; sosialisasi dan internalisasi RB belum dilaksanakan secara terus menerus
- 2) Regulasi Kebijakan; Identifikasi dan analisis pemutakhiran pemetaan seluruh peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/sinkron belum dilaksanakan secara berkelanjutan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; Tindak lanjut evaluasi penyesuaian beban kerja SKPD belum maksimal
- 4) Penataan Tata Laksana; Belum disusunnya Peta Proses Bisnis Setda, SOP belum sesuai dengan Peta Proses Bisnis
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM; Belum adanya review terhadap standar kompetensi jabatan PNS Setda dan kinerja individu belum dilakukan monev secara berkala
- 6) Penguatan Akuntabilitas; Belum terlibatnya pimpinan secara menyeluruh dalam penyusunan dokumen perencanaan
- 7) Penguatan Pengawasan;
 - Penerapan SPIP belum optimal
 - Monev pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara berkala
 - Belum optimalnya penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

- Belum maksimalnya pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi
- Belum maksimalnya penerapaaan budaya pelayanan prima

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya rencana tindak lanjut untuk menjamin perbaikan Program Reformasi Birokrasi Lingkup Sekretariat Daerahguna mendukung pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, rencana tindak lanjut dimaksud adalah sebagai berikut :

NO.	AREA PERUBAHAN RB	HASIL EVALUASI
1.	Manajemen Perubahan	a. Telah membuat Keputusan terkait Tim RB sesuai Area pada LKE b. Melakukan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi c. Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kinerja kearah yang lebih baik
2.	Regulasi Kebijakan	a. Melakukan Indintifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron secara berkelanjutan; b. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan indentifikasi,analisa dan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron yang terbaru dengan melibatkan Tokoh Masyarakat.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Penataan kelembagaan berbasis kinerja; b. Evaluasi kelembagaan kesesuaian beban kerja organisasi
4.	Penataan Tatalaksana	a. Melakukan reviu terhadap SOP; b. Penyusunan Draft Keputusan Peta Proses Bisnis; c. Penyusunan SOP sesuai Peta Proses Bisnis; d. Melakukan Evaluasi Peta Proses dan Penerapan SOP; e. Melakukan pemuktahiran data dan informasi publik.
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	a. Reviu terkait Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; b. Melakukan Riviu kebutuhan pegawai sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan; c. Pemberian reward dan punishment terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; d. Reviu terhadap standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; e. Pemanfaatan system informasi kepegawaian; f. Melakukan monev kinerja individu secara berkala.
6.	Penguatan Akuntabilitas	a. Memaksimalkan Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Dokumen perencanaan ; b. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan SKPD dengan Kabupaten c. Melakukan revisi Indikator Kinerja Utama Pejabat Eselon II d. Evaluasi Internal Terhadap Capaian Kinerja SKPD e. Pemenuhan dokumen data dukung capaian target kinerja SKPD f. Memaksimalkan Komitmen Pimpinan dan seluruh ASN dalam Implementasi SAKIP
7.	Penguatan Pengawasan	a. Membangun komitmen anti Gratifikasi disetiap pelayanan; b. Melakukan identifikasi Risiko SKPD; c. Melakukan peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan

		masyarakat melalui Aplikasi WBS; d. Meningkatkan Penanganan Pelaporan Benturan Kepentingan; e. Melakukan peningkatan pembangunan Zona Integritas untuk meraih WBK
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Evaluasi atas Pengembangan system informasi layanan masyarakat; b. Meningkatkan informassi pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c. Meningkatkan nilai atas persepsi Kualitas Pelayanan Publik. d. Pengembangan Aplikasi Layanan untuk mempermudah pelayanan

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Umum Tahun 2022*

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700/161-LHE/Irban IV/Insp/2022 tanggal 10 Juni 2022 Hal Laporan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nilai 33,61 (92,59%) dengan kategori AA (Istimewa), berikut ini disajikan tabel hasil penilaian mandiri Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL EVALUASI	
		Nilai	%
1	2	3	4
A	Aspek Pemenuhan		
1	Manajemen perubahan	1,96	98,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	100,00
4	Penata an Tatalaksana	0,83	83,00
5	Penataan Manajemen SDM	1,32	94,29
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	100,00
7	Penguatan Pengawasan	2,03	92,27
8	Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik	1,95	78,00
Jumlah		13,59	93,08
B	REFORM		
1	Manajemen Perubahan	3,00	100,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	100,00
4	Penataan Tatalaksana	3,26	86,93
5	Penataan Manajemen Sdm	1,25	62,50
6	Penguatan Akuntabilitas	3,41	90,93
7	Penguatan Pengawasan	1,85	94,87
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	100,00
JUMLAH		20,02	92,26
Total Jumlah Komponen Pengungkit		33,61	92,59

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan program utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi.

Dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah, maka diperlukan komitmen bersama antara Pimpinan dan jajarannya untuk menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN.

Disamping itu, selain komitmen bersama, pimpinan sebagai *role model* dapat menjadi panutan bagi PNS di Lingkup Sekretariat Daerah dengan membangun Nilai Budaya bagi seluruh Aparatur Sekretariat Daerah dalam bentuk slogan Budaya yaitu:

- **INTEGRITAS** dengan konsisten dalam setiap tindakan
- **PROFESIONAL** dalam melaksanakan tugas
- **AKUNTABEL** dengan sikap yang mampu mempertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan melaksanakan tugas

Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain dalam melaksanakan pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian lingkup Sekretariat Daerah.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
1.	Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1) Memfasilitas pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; 2) Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; 3) Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 4) Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; 5) Memfasilitasi layanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		kepada masyarakat luas; 6) Melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personil UKPBJ; 7) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota; 8) Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP; dan 9) Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.
2.	Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat	1) Pemberian bantuan hibah bagi tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 2) Sosialisasi kelengkapan administrasi dan tata cara penyaluran dana; hibah daerah kepada pengurus tempat ibadah dan lembaga/organisasi keagamaan; 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hibah daerah untuk tempat ibadah dan lembaga/ organisasi keagamaan; 4) Fasilitasi kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan; 5) Pemberian insentif bagi guru-guru TPA, Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren dan Penyuluh Agama; 6) Fasilitasi pembayaran BPJS Ketenaga kerjaan bagi Penyuluh Agama; 7) Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji; 8) Fasilitasi pemberian bantuan Beasiswa bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang Agama); 9) Fasilitasi kegiatan keagamaan (MTQ, Betamat Al Qur'an, Wisuda Santri, Hari Santri Nasional, MQK, PORSADIN, FASI dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama) bagi organisasi/lembaga keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 10) Pembinaan bagi lembaga/organisasi keagamaan (LPTQ, BKPRMI, FKPP, FKDT dan FKUB); 11) Fasilitasi Tausiyah Keagamaan lingkup Sekretariat Daerah; 12) Fasilitasi pelaksanaan seleksi dan Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Laut; dan 13) Fasilitasi Penetapan Kepengurusan LPTQ, PHBI, Masjid Agung Syuhada dan PESPAWARI Kabupaten Tanah Laut.
3.	Pelayanan Bagian Pemerintahan	1) Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah; 3) Sosialisasi Penyusunan IKK LPPD; 4) Fasilitasi Kegiatan <i>Coffe Morning</i>; 5) Fasilitasi Perayaan Hari-Hari Besar Nasional dan Kabupaten; 6) Fasilitasi Penyusunan LKPJ/LPPD; 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada; dan 8) Fasilitasi Administrasi Pimpinan dan PAW Anggota DPRD.
4.	Pelayanan Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA	1) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BUMD dengan Pemerintah Daerah; 2) Memfasilitasi kegiatan koordinasi BLUD dengan Pemerintah Daerah; 3) Fasilitasi kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD; 4) Fasilitasi kegiatan penyusunan Kajian/Analisa Investasi Pemerintah Daerah;

NO	BAGIAN	JENIS LAYANAN
		5) Mengkoordinasikan kegiatan promosi produk unggulan daerah; 6) Mengkoordinasikan kegiatan penyaluran Kredit Modal Kerja Tanpa Bunga Program Gapura Karomah; 7) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait UMKM; 8) Fasilitas dan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian lintas sektoral; 9) Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan pelaporan Administrasi Pembangunan; 10) Memfasilitasi kegiatan koordinasi di Bidang Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain-lain); 11) Fasilitas kegiatan pengendalian distribusi gas bersubsidi; dan 12) Memfasilitasi kegiatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
5.	Pelayanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1) Memfasilitasi Protokoler Kegiatan Pimpinan; 2) Memfasilitasi Protokoler Tamu Daerah; 3) Memfasilitasi Pembuatan Viedo Pimpinan; 4) Dokumentasi Kegiatan Pimpinan; 5) Memfasilitasi Pemberitaan Kegiatan Pimpinan; dan 6) Memfasilitasi Pembuatan Naskah Pidato.
6.	Pelayanan Bagian Hukum	1) Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah; 2) Memfasilitasi Bantuan Hukum dan HAM; 3) Konsultasi dan Pengkajian Hukum; dan 4) Koreksi draft MoU, NPHD, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Keperdataan lainnya.
7.	Pelayanan Bagian Umum	1) Memfasilitasi Penyewaan Gedung; 2) Memfasilitasi Penyewaan Bus; 3) Pelayanan Tamu Daerah; 4) Memberikan Pelayanan Surat Menyurat; 5) Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut; dan 6) Memberikan Pelayanan dan Penyimpanan Arsip di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8.	Pelayanan Bagian Organisasi	1) Fasilitas Penyusunan Laporan Kinerja; 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Pendampingan Penyusunan Anjab, ABK dan Evjab; 4) Pendampingan Penyusunan SOTK dan Tupoksi/Uraian Tugas Jabatan SKPD; 5) Pembuatan ID Card Pegawai; 6) Fasilitas Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 7) Fasilitas Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan 8) Fasilitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP).
9.	Pelayanan Bagian Perencanaan dan Keuangan	1) Fasilitas Pembayaran Pendapatan/Gaji dan Tunjangan Operasional Pimpinan; 2) Fasilitas Pembayaran Pendapatan/Gaji dan TPP ASN Sekretariat Daerah; 3) Fasilitas Penyusunan Renja Sekretariat Daerah; 4) Fasilitas Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) dan Keuangan; 5) Fasilitas Penyusunan Manajemen Risiko; dan 6) Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022*

Diharapkan dengan layanan yang telah dilaksanakan oleh Bagian-bagian dapat memberikan pelayanan secara maksimal dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik bagi masyarakat, instansi vertikal maupun untuk layanan Perangkat Daerah.

1.1.2.2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Sekretariat Daerah bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 sekaligus menjadi Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang **"BERINTERAKSI"**

- ❖ **Berkarya**
- ❖ **Inovasi**
- ❖ **Tertata**
- ❖ **Religius**
- ❖ **Aktual**
- ❖ **Sinergi**

Visi tersebut menunjukkan adanya keinginan yang kuat dari segenap unsur aparatur pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan demikian Sekretariat Daerah diharapkan mampu menampilkan dirinya sebagai motor penggerak, sebagai koordinator perumusan kebijakan pemerintah daerah, sehingga dapat bergerak cepat, penuh energi dan menghasilkan kebijakan yang akurat dan memberi daya dorong yang kuat bagi pembangunan daerah serta

mampu memberi dorongan yang kuat bagi semua perangkat daerah agar senantiasa bertenaga, mampu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan yang selalu bergerak maju menuju kemajuan masa depan.

Komitmen untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Sekretariat Daerah menetapkan misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

b. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang

semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang

berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi

bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memegang Misi ke :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Tujuan Organisasi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun untuk Renstra Tahun 2024-2026 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah :

1. Tujuan Strategis
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
 - b. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan dari Pemerintah adalah merupakan IKU Kabupaten yang diselaraskan ke IKU Sekretariat Daerah.
2. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya kualitas pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Organisasi.
 - b. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Akuntabel, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh

Bagian Perencanaan & Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Prokopim.

- c. Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah, adalah IKU Sekretariat Daerah yang di ampu oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Kesra, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Adm. Pembanguann dan SDA, dan Bagian Pemerintahan.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam tabel T-C. 25.

TABEL T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2019 - 2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KET
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	BAIK (85)	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	81	81,5	82	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Persentase peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	100%	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	BAIK (75)	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,060	ST 3,075	ST 3,100	ST 3,125	ST 3,150	Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	75	80	85	90	100	Sekretariat Daerah dan Bagian Organisasi
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	85	90	95	100	100	
	Meningkatnya Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	BB (85)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Sekretariat Daerah dan Bagian Umum
					Nilai ZI Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	
	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta Administrasi Kewilayahan	Persentase kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Daerah serta administrasi kewilayahan	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
					Persentase kegiatan Peringatan hari besar Nasional/Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan

				Meningkatnya Penyelenggaraa n Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
				Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke Tiga	Persentase dokumen kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pemerintahan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kualitas penyelenggara n pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, serta Kinerja dan Reformasi	100%	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	65%	70%	80%	90%	100%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan RB minimal 60	10%	20%	30%	40%	50%	Bagian Organisasi
				Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Persentase Unit Pelayanan dengan nilai SKM Minimal 80	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi

		Birokrasi										
					Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	
				Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Persentase kualitas penyelenggaraan, pemanataan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100%	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase kualitas penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	80	82	82	83	85	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
					Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
				Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	-	-	-	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	

	Meningkatkan kualitas Pelayanan Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Asset Perlengkapan serta Umum dan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	100%	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada Bagian-Bagian lingkup Setda sarana prasarana/aset milik Sekretariat Daerah dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Umum
				Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Peningkatan komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	80	85	90	91	92	Bagian Umum
					Peningkatan komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	80	82	83	84	85	Bagian Umum
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase Paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

	Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	dan evaluasi di Bidang Pengelolaan pengadaan barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa		Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	-	65%	75%	85%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya kompetensi SDM dalam proses PBJ yang berkualitas	Persentase SDM yang kompeten dalam Pengadaan Barang/jasa	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
				Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	-	-	100%	5%	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembentukan Produk Hukum Pengaturan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pruduk Hukum Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum	100%	Meningkatnya Informasi Produk Hukum	Persentase Informasi Produk Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum	Persentase Produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Tingkat Penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Hukum
				Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 75	Nilai 76	Bagian Hukum

	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi	100%	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintah daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase kegiatan KDH/WKDH/SK PD/Tamu daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
					Persentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat	Persentase kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di Bidang Bina	100%	Meningkatnya pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat

		Mental Spiritual, Kesejahteraan sosial dan Budaya serta kesejahteraan masyarakat		Meningkatnya peran serta Organisasi/Lembaga Keagamaan/SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%	Meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sekda dan Kabag Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	Persentase penyelenggaraan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan wilayah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan serta Sumber Daya Alam	100%	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahna terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi	60%	75%	75%	100%	100%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam
				Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	-	-	80%	80%	85%	Bagian Perkonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t		
									Sebelu m	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebelu m	Sesuda h	Sebelum	Sesudah					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												69.255.985.112	70.405.976.540	####		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												36.856.107.207	38.018.594.842	#####		
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN															21.720.727.136	22.521.459.313			####		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												19.656.895	20.389.072	117.668.012		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	76.61 ikm	76.61 ikm	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9.307.185	10.039.362		Nilai IKM	76.61 ikm	67.668.012	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Laporan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan	76.61 ikm	76.61 ikm	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10.349.710	10.349.710		Nilai IKM	76.61 ikm	50.000.000	

								Keuangan											
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20.880.184.065	21.680.184.065	####		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IKM	Tersedianya Gaji dan TPP ASN	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	76.61 ikm	76.61 ikm	14 Bulan	14 Bulan	100 Persen	100 Persen	20.871.184.320	21.671.184.320	Nilai IKM	76.61 ikm	####
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai IKM	Jumlah Dokumen Laporan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan	76.61 ikm	76.61 ikm	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8.999.745	8.999.745	Nilai IKM	76.61 ikm	75.000.000
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										820.886.176	820.886.176	891.974.794		
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IKM	Tersedianya Gaji dan Operasional KDH/WKDH	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum dan Keuangan	76,61 Nilai	76,61 Nilai	14 Bulan	14 Bulan	100 Persen	100 Persen	820.886.176	820.886.176	IKM	76,61 Nilai	891.974.794
BAGIAN UMUM															14.225.348.401	14.402.122.338	####		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										107.000.000	107.000.000	789.250.000		

4	01	01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	IKM	Jumlah Pemulangan Jenazah	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Kali	1 Kali	100 Persen	100 Persen	25.000.000	25.000.000	IKM	76,61 Nilai	30.250.000
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	IKM	Jumlah Kepesertaan/Bimbi Teknis	Persentase nCgaapnaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	3 Orang	3 Orang	100 Persen	100 Persen	82.000.000	82.000.000	IKM	76,61 Nilai	759.000.000
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										2.799.537.217	2.976.317.230	8.471.563.496		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	119.125.462	119.125.462	IKM	76,61 Nilai	150.475.963
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	100 Persen	157.879.941	157.879.941	IKM	76,61 Nilai	208.924.397
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IKM	Jumlah Bahan Logistik	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	308.202.608	308.200.645	IKM	76,61 Nilai	582.147.456
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	84.759.206	84.891.182	IKM	76,61 Nilai	187.405.680

4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IKM	Jenis Buku	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	0	0	IKM	76,61 Nilai	3.872.000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	IKM	Jumlah Pameran	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	6 Kali	6 Kali	100 Persen	100 Persen	30.000.000	30.000.000	IKM	76,61 Nilai	296.604.000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM	Jumlah Orang	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	153 Orang	153 Orang	100 Persen	100 Persen	74.970.000	74.970.000	IKM	76,61 Nilai	164.934.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Jumlah honorarium Pengawasan Pimpinan Daerah Jumlah Perjalanan Dinas	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 orang 250 Orang	5 orang 250 Orang	100 Persen	100 Persen	2.024.600.000	2.201.250.000	IKM	76,61 Nilai	6.877.200.000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										426.925.104	426.925.104	4.633.659.789		
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	14 Jenis	14 Jenis	100 Persen	100 Persen	426.925.104	426.925.104	IKM	76,61 Nilai	4.633.659.789
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										5.608.864.964	5.608.864.952	7.351.697.500		

4	0108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM	Jumlah Belanja Air Jumlah Belanja Internet Jumlah Belanja Listrik Jumlah Belanja Telepon Jumlah TV Kabel	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	100 Persen	100 Persen	1.627.124.564	1.627.124.552	IKM	76,61 Nilai	2.207.610.614
4	0108	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	8 Jenis	8 Jenis	100 Persen	100 Persen	368.280.000	368.280.000	IKM	76,61 Nilai	965.250.000
4	0108	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM	Jumlah Orang	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	145 Orang	145 Orang	100 Persen	100 Persen	3.613.460.400	3.613.460.400	IKM	76,61 Nilai	4.178.836.886
4	0109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2.605.734.616	2.605.728.552	5.756.991.755		
4	0109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 Unit	5 Unit	100 Persen	100 Persen	233.930.347	233.930.347	IKM	76,61 Nilai	257.334.000

4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IKM	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	109 Unit	109 Unit	100 Persen	100 Persen	1.546.656.019	1.546.649.955	IKM	76,61 Nilai	2.797.526.655
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	20.000.000	20.000.000	IKM	76,61 Nilai	25.500.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/R eh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Pemeliharaan/R eh Gedung Kantor	Persentase abCialitpaasii an Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	5 Gedung	5 Gedung	100 Persen	100 Persen	518.623.050	518.623.050	IKM	76,61 Nilai	2.146.340.900
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/R eh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM	Jumlah Jenis	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	15 Jenis	15 Jenis	100 Persen	100 Persen	286.525.200	286.525.200	IKM	76,61 Nilai	530.290.200
4	01	01	2.11	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										314.486.500	314.486.500	346.060.000		

4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	IKM	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum dan Keuangan	76,61 Nilai	76,61 Nilai	20 stel	20 stel	100 Persen	100 Persen	94.486.500	94.486.500	IKM	76,61 Nilai	104.060.000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	IKM	Jumlah Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum dan Keuangan	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun	1 Tahun	100 Persen	100 Persen	220.000.000	220.000.000	IKM	76,61 Nilai	242.000.000
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										2.362.800.000	2.362.800.000	3.205.361.500		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	IKM	Jumlah Makan Minum KDH Jumlah Makan Tamu	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun 14158 orang	1 Tahun 14158 orang	100 Persen	100 Persen	753.290.000	753.290.000	IKM	76,61 Nilai	828.619.000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	IKM	Jumlah Makan Minum WKDH Jumlah Makan Tamu	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	1 Tahun 13009 orang	1 Tahun 13009 orang	100 Persen	100 Persen	560.675.000	560.675.000	IKM	76,61 Nilai	616.742.500
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	IKM	Jumlah Orang	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Umum	76,61 Nilai	76,61 Nilai	42325 orang	42325 orang	100 Persen	100 Persen	1.048.835.000	1.048.835.000	IKM	76,61 Nilai	1.760.000.000
BAGIAN ORGANISASI															345.032.464	380.032.464	####		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi										345.032.464	380.032.464	1.031.320.654		

4	0	0	2.	0	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai IKM	Jumlah SKPD yang memiliki analisis beban kerja Jumlah SKPD yang memiliki evaluasi jabatan Jumlah SKPD yang memiliki informasi jabatan Jumlah SKPD yang memiliki SOTK yang jelas Jumlah SKPD yang memiliki standar kompetensi jabatan Jumlah SKPD yang telah memiliki uraian tugas yang telah di evaluasi sesuai aturan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Organisasi	76.61 ikm	76.61 ikm	40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD	40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD 40 SKPD	100 Persen	100 Persen	117.231.862	117.231.862	Nilai IKM	76.61 ikm	375.000.00 0
---	---	---	----	---	---	-----------	--	---	--------------	--------------	--	--	---------------	---------------	-------------	-------------	-----------	--------------	-----------------

4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai IKM	Jumlah Regulasi Standarisasi Pedoman Kerja Jumlah SKPD yang berpartisipasi pada Inovasi Pelayanan Publik Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melaksanakan Standart Pelayanan Publik	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Organisasi	76.61 ikm	76.61 ikm	5 Perbup 5 SKPD 40 SKPD 3 Unit	5 Perbup/ SK 5 SKPD 40 SKPD 3 Unit	100 Persen	100 Persen	117.325.689	117.325.689	Nilai IKM	76.61 ikm	337.542.799
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai IKM	Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang disusun sesuai Permenpan 53 Tahun 2014 Jumlah SKPD yang diasistensi terkait Laporan Kinerja Jumlah SKPD yang dibina terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Organisasi	76.61 ikm	76.61 ikm	40 SKPD 5 Dokumen 3 SKPD	1 Dokumen 40 SKPD 40 SKPD	100 Persen	100 Persen	110.474.913	145.474.913	Nilai IKM	76.61 ikm	318.777.855
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN															564.999.206	714.980.727			####

4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											564.999.206	714.980.727	2.371.321.315			
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai IKM	• Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya • Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	76.61 ikm	76.61 ikm	430 kali 28 kali	430 kali 28 kali	100 Persen	100 Persen	189.708.730	229.700.261		Nilai IKM	76.61 ikm	545.651.315	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai IKM	• Jumlah dokumen pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah komunikasi pimpinan yang terfasilitasi • Jumlah liputan pemberitaan kegiatan KDH/WKDH • Jumlah Publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah melalui media elektronik dan media sosial	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	76.61 ikm	76.61 ikm	1 kali 280 kali 680 kali 680 berita	1 kali 280 kali 680 kali 680 berita	100 Persen	100 Persen	169.757.800	219.757.800		Nilai IKM	76.61 ikm	1.165.670.000	

4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Nilai IKM	• Jumlah pelayanan kehumasan KDH/WKDH • Jumlah pendokumentasian kegiatan KDH/WKDH	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	76.61 ikm	76.61 ikm	200 kali 300 kali	200 kali 300 kali	100 Persen	100 Persen	205.532.676	265.522.666		Nilai IKM	76.61 ikm	660.000.000
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										31.269.578.237	31.257.558.938	#####			
BAGIAN PEMERINTAHAN															1.606.382.903	1.570.487.021			####	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan										1.506.408.647	1.447.516.925	2.622.955.841			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Kegiatan koordinasi Forkopimda yang berhasil difasilitasi Jumlah Rapat Penyelenggaraa n Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintaha n	3,1250 Skor	3,1250 Skor	12 kali 50 Kali	8 kali 50 Kali	100 Persen	100 Persen	1.156.823.947	1.053.427.225		Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	2.257.820.796
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kecamatan yang berhasil difasilitasi Jumlah Penyelesaian Permasalahan pada kegiatan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintaha n	3,1250 Skor	3,1250 Skor	11 Kali 1 Dokum en	11 Kali 1 Dokume n	100 Persen	100 Persen	229.980.000	229.980.000		Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	193.747.862

4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokumen LKPJ yang terselesaikan Jumlah Dokumen LPPD yang terselesaikan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintahan	3,1250 Skor	3,1250 Skor	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	119.604.700	164.109.700	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	171.387.183
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah										99.974.256	122.970.096	152.371.549		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pihak ketiga yang terselesaikan	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pemerintahan	3,1250 Skor	3,1250 Skor	6 Dokumen	6 Dokumen	100 Persen	100 Persen	99.974.256	122.970.096	Peningkatan Nilai LPPD (skor)	3,1250 Skor	152.371.549
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															29.062.490.932	29.062.482.627	####		
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										29.062.490.932	29.062.482.627	####		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	Kegiatan Lembaga / organisasi kemasyarakatan dan masyarakat	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	77 Skor	77 Skor	2 kali 76 buah	2 kali 115 buah	100 Persen	100 Persen	7.042.116.816	7.042.116.816	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	77 Skor	####
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	Kegiatan Pembayaran insentif bagi guru TKA/TPA, Madin/MIS, Ponpes dan Penyuluh Agama	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	77 Skor	77 Skor	3 kali 3290 orang	3 kali 3290 orang	100 Persen	100 Persen	19.932.789.409	20.221.705.929	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	77 Skor	####

4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Organisasi/lembag yang difasilitasi untuk kegiatan keagamaan Jumlah Pendidikan keagamaan yang di bina	Persentase aCapaian Kinerja di Bagian Pelayanan Kesejahteraa n Rakyat	77 Skor	77 Skor	10 Kegiatan 4 Lembaga 4 lembaga	10 Kegiatan 4 Lembaga 4 lembaga	100 Persen	100 Persen	2.087.584.707	1.798.659.882	Indeks kepuasan masyarakat (skor)	77 Skor	5.151.011.718
BAGIAN HUKUM															600.704.402	624.589.290			####
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										600.704.402	624.589.290	636.755.655		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang telah difasilitasi dan diharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan Jumlah Produk Hukum yang dikoreksi atau yang diharmonisasi	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	100 %	100 %	19 Dokumen 200 Dokumen	19 Dokumen 200 Dokumen	100 Persen	100 Persen	239.989.353	239.989.353	Terfasilitan ya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	266.738.288

4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kabupaten / Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Jumlah Kesepakatan bersama, Perjanjian Kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah, dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Jumlah masalah hukum yang di tangani	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	100 %	100 %	4 Kegiatan 400 Dokumen 4 Kasus	4 Kegiatan 400 Dokumen 4 Kasus	100 Persen	100 Persen	203.924.241	203.924.241	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	186.959.978
---	----	----	------	----	--------------------------	---	--	-------	-------	--------------------------------	--------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	---	-------	-------------

4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Cetak Produk Hukum Daerah Jumlah Kegiatan Pengelolaan Website jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Tanah Laut Jumlah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang diterbitkan Jumlah Peserta yang menerima / mendapatkan sosialisasi / Penyuluhan Hukum Jumlah Registrasi dan Dokumentasi Produk Hukum	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Hukum	100 %	100 %	300 Eksempla 365 Hari 800 Dokumen 80 Orang 100 Persen	300 Eksempla 365 Hari 800 Dokumen 80 Orang 100 Persen	100 Persen	100 Persen	156.790.808	180.675.696	Terfasilitanya Penyusunan produk hukum daerah/ lainnya / Bantuan Hukum dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100 %	183.057.389
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										1.130.299.668	1.129.822.760	3.581.749.951		
BAGIAN PEREKONOMIAN															317.015.558	317.015.558			####
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										199.775.476	199.775.476	773.685.559		

4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Analisis Investasi Daerah Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BLUD Dokumen Laporan Fasilitas Pembinaan BUMD	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	21 Dokumen	21 Dokumen	100 Persen	100 Persen	99.839.150	99.839.150	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	348.977.020
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	21 Dokumen	21 Dokumen	100 Persen	100 Persen	0	0	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	98.751.697

4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Fasilitas Promosi Daerah Dokumen Laporan Monev Pinjaman Tanpa Agunan dan Bunga 0%	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	99.936.326	99.936.326	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	325.956.842
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										117.240.082	117.240.082	746.462.598		

4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Dokumen Laporan Administrasi Pembangunan Dokumen Laporan Tim Monev KUR Dokumen Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	0100 persen	0100 persen	11 Dokumen	11 Dokumen	100 Persen	100 Persen	117.240.082	117.240.082	persentase Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian daerah Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	nn0100 persen	746.462.598
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															813.284.110	812.807.202			####
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										813.284.110	812.807.202	2.061.601.794		

4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah paket yang diproses dalam kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu Jumlah SKPD yang difasilitasi dan didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	150 Paket 40 SKPD	150 Paket 40 SKPD	100 Persen	100 Persen	299.708.039	299.708.039	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 persen	1.238.289.161
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah aplikasi dan sistem informasi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan infrastruktur Jumlah Paket Pengadaan yang masuk dalam LPSE sesuai prosedur	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	4 aplikasi 150 Paket	4 aplikasi 150 Paket	100 Persen	100 Persen	227.412.584	226.940.676	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 persen	356.135.902

4	013	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Jumlah Fasilitas Pembinaan SKPD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Fasilitas pengelolaan personil Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Capaian Kinerja di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen	100 persen	40 SKPD 25 Orang	40 SKPD 25 Orang	100 Persen	100 Persen	286.163.487	286.158.487	Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	100 persen	467.176.731
TOTAL														69.255.985.112	70.405.976.540	####		

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2022, hal tersebut d iatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon II Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	90.44	111%
2	Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD	Jumlah inovasi SKPD yang didaftarkan	1	10	1000%
3	Meningkatnya skor LPPD Kabupaten	Skor LPPD Kabupaten	ST 3,125	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri	Nilai Belum Terbit dari Kemendagri
4	Meningkatnya Penerapan RB Pemerintah Daerah	Persentase SKPD dengan nilai RB minimal B	90	100	111,11%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal BB	100	100	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3,6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi
7	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai RB Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%
		Nilai ZI Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%
8	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang diterapkan	100%	100%	100%
	Total				216%

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon III Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON III						
1	Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik	Persentase layanan Pimpinan/Bagian/ SKPD/ Masyarakat dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-1 "Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya"
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib	Persentase layanan pada bagian-bagian Lingkup Setda sarana prasarana/ aset milik Setda terkelola dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Mengampu Misi ke-3: "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan,Pemantauan dan Evaluasi dibidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Tata Usaha Pimpinan, Staff Ahli dan Kepegawaian	100%	100%	100%	
4	Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan yang baik lingkup Sekretariat Daerah	Nilai Komponen area perubahan Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Daerah	91	92.59	101.7%	
		Nilai Komponen area perubahan Zona Integritas lingkup Sekretariat Daerah	84	87.74	104.4%	
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berhasil di tindaklanjuti	100%	75%	75%	Bagian Pemerintahan Mengampu Misi ke- 3 : "Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)"
		Persentase kegiatan peringatan hari besar Nasional/ Kabupaten yang diselenggarakan	100%	100%	100%	
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan tata batas antar daerah yang berhasil ditindaklanjuti	-	-	-	
7	Meningkatnya Pemenuhan IKK SKPD	Persentase Pemenuhan IKK SKPD	100%	95%	95%	
8	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ke tiga	Persentase Dokumen Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri yang berhasil	100%	100%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		ditindaklanjuti				
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase SKPD dengan nilai komponen pelaporan kinerja minimal 10	90%	97,5%	108,33%	Bagian Organisasi Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
10	Meningkatnya Nilai Area Perubahan RB SKPD	Persentase SKPD dengan Nilai Komponen Area Perubahan minimal 60	40%	100%	250%	
11	Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM minimal 80	100%	100%	100%	
		Persentase SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	95%	95%	
12	Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan	Persentase Perangkat daerah dengan kelembagaan yang efektif	100%	90%	90%	
13	Meningkatnya layanan administrasi bidang perencanaan	Persentase layanan administrasi bidang perencanaan	100%	100%	100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
14	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja lingkup Sekretariat Daerah	Persentase penyusunan pelaporan kinerja yang sesuai aturan	100%	100%	100%	
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83	84.2	101.44%	
		Nilai SPIP Sekretariat Daerah	3.6	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	Masih Tahap Baseline SPIP Terintegrasi	
	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sesuai aturan	100%	100%	100%	
16	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik	Persentase paket pengadaan yang terlayani dalam pengadaan/jasa sesuai standar dan tepat waktu	100%	110%	110%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
17	Meningkatnya SKPD melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem LPSE	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintahan melalui sistem LPSE	85%	117%	142.6%	
18	Meningkatnya Kompetensi SDM dalam Proses PBJ yang Berkualitas	Persentase SDM yang Kompeten dalam Pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	
19	Meningkatnya efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	Persentase efisiensi pagu Pengadaan Barang Jasa	5%	8.95%	179%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Meningkatnya informasi produk hukum	Persentase informasi produk hukum	100%	100%	100%	Bagian Hukum Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
21	Meningkatnya harmonisasi produk hukum	Persentase produk hukum yang harmonis	100%	100%	100%	
22	Tingkat penanganan kasus/perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase kasus/perkara hukum yang tertangani	100%	100%	100%	
23	Nilai Pemenuhan Kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut	Nilai Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM)	Nilai 75	Nilai 78,4	104,5%	
24	Meningkatnya layanan informasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan dokumentasi.	Persentase penyebarluasan informasi/pemberitaan pembangunan pemerintahan daerah yang bisa diakses masyarakat melalui media	100%	100%	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
		Persentase kegiatan dokumentasi KDH/WKDH yang terlayani	100%	100%	100%	
		Persentase kegiatan KDH/WKDH/SKPD/ tamu Daerah yang terlayani keprotokolannya	100%	100%	100%	
		Persentase komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	100%	0%	0%	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditandaklanjuti	100%	0%	0%	
25	Meningkatnya Pembinaan Lembaga sosial dan keagamaan	Persentase peningkatan Lembaga sosial dan keagamaan yang dibina	100%	76.67%	76.67%	Bagian Kesejahteraan Rakyat Mengampu Misi ke- 3 : “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”
26	Meningkatnya layanan bantuan sosial keagamaan	Persentase layanan bantuan sosial keagamaan	100%	93.63%	93.63%	
27	Meningkatnya Peran serta Organisasi/ Lembaga Keagamaan /SKPD dalam Bidang Pemuda dan Olahraga	Persentase hasil tindak lanjut koordinasi kegiatan bidang keagamaan, pemuda dan olahraga	100%	89.65%	89.65%	
28	Meningkatnya penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian permasalahan terkait perekonomian dan pembangunan	100 %	100 %	100%	Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Mengampu misi ke-5 “Membangun Sinergitas Yang Baik Antar Tingkat Pemerintahan
29	Meningkatnya BUMD yang sehat dan berdayasaing	Persentase BUMD yang berkinerja positif	75%	75%	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi permodalan	Persentase UMKM yang terfasilitasi permodalan	75%	75%	100%	Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"
31	Meningkatnya kualitas manajemen data administrasi pembangunan yang proporsional	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan progres pembangunan fisik	80%	80%	100%	

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Esselon IV Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ESELON IV						
1	Melaksanakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana/aset Sekretariat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana/aset milik Setda yang terpelihara dan terkelola dengan baik	614 Jenis	614 Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
2	Melaksanakan Pelayanan Urusan Pimpinan/Bagian/SKP D/ dan Masyarakat	Jumlah layanan Pimpinan/Bagian/SKP D dan Masyarakat terlayani dengan baik	70.822 Ok	70.822 Ok	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
3	Melaksanakan Pelayanan bidang transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah layanan transportasi, konsumsi dan gedung pertemuan di Lingkup Sekretariat Daerah terlayani dengan baik	100%	100%	100%	Bagian Umum Kasubbag Umum dan Rumah Tangga
4	Melaksanakan pengadaan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset yang didistribusikan di Lingkup Sekretariat Daerah	91 Jenis	91 Jenis	100%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan Perlengkapan
5	Melaksanakan Pengelolaan, Pencatatan Aset dan Penghapusan aset di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah aset Sekretariat Daerah yang terkelola dan tercatat dengan baik	2.468 Jenis	2.000 Jenis	81%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan Perlengkapan
6	Melaksanakan Rumusan Analisa Kebutuhan Barang di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan barang berupa rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) sesuai standar dan kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubbag Asset dan Perlengkapan
7	Memberikan Pelayanan Surat Menyurat lingkup SKPD dan Setda sesuai SOP	Jumlah SKPD/Bagian Lingkup Setda yang terlayani administrasi surat menyurat	40 SKPD dan 9 Bagian	40 SKPD dan 9 Bagian	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
8	Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian lingkup	Jumlah Administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah yang terselesaikan	250 Kali	260 Kali	104%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

NO	SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sekretariat Daerah					
9	Memberikan pelayanan Administrasi Pimpinan lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Pimpinan Daerah (KDH/WKDH/SEKDA)	250 Kali	270 Kali	108%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
10	Pengelolaan dan penyimpanan arsip Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah arsip yang dikelola sesuai SOP	3.500 Surat	3.407 Surat	97%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
11	Melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	126 Dokumen	126 Dokumen	100%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
12	Melaksanakan Zona Integritas di Lingkup Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen area perubahan Zona Integritas Sekretariat Daerah	96 Dokumen	112 Dokumen	116%	Bagian Umum Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
13	Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	Jumlah Terlaksananya kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai standar dan tepat waktu	150 Paket	165 Paket	110%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
14	Melakukan pendampingan SKPD dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	Jumlah fasilitasi SKPD yang didampingi dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak	40 SKPD	40 SKPD	100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
15	Kegiatan keprotokolkan KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang terlayani keprotokolannya	430 Kali	430 Kali	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kasubbag Protokol
16	Pelayanan tamu KDH/WKDH yang terlayani	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terlayani dengan baik	28 Kali	28 Kali	100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kasubbag Protokol

1.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Capaian Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

1.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Untuk Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022 DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI (OUTCOME)	RUMUS	ISIAN ELEMEN DATA LPPD		CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022	kontrak	0	Tidak ada kontrak konstruksi di atas 50 Milyar Rupiah
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022	1601 Kontrak		
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	<u>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</u> Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (> 50 Juta)	1601 paket	36,01	Data diambil dari sirup.lkpp.go.id
			Jumlah Pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif (≤ 50 Juta)	4446 paket		
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	<u>Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan</u> Total belanja langsung	Jumlah nilai langsung yang melalui pengadaan	883,641,136,968.81	57.52	
			Total belanja langsung	1,536,126,753,030.18		

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan LKPj kepada DPRD telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, atas Laporan kemajuan yang telah dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menciptakan tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Sekretariat Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, yang dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintahan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bahan informasi dan laporan kepada Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Tanah Laut Akhir Tahun Anggaran 2022.

2. Penghargaan dan Inovasi

Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 dengan (Predikat BAIK) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), terdapat peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut :

NO	NILAI ITKP		PENINGKATAN
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
1	73,94	77,9	3,99

2) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Tanah Laut Mendapatkan Indeks 4,52 Kategori (A) .

No	DPM-PTSP KAB/KOTA	Indeks	Kategori
57	Kota Batam	4,53	A
58	Kabupaten Banyuwani	4,53	A
59	Kabupaten Karawang	4,53	A
60	Kota Mojokerto	4,53	A
61	Kota Singkawang	4,53	A
62	Kota Balikpapan	4,53	A
63	Kabupaten Cilacap	4,53	A
64	Kabupaten Batang	4,53	A
65	Kabupaten Karanganyar	4,53	A
66	Kabupaten Pati	4,53	A
67	Kabupaten Barru	4,53	A
68	Kota Sawahlunto	4,52	A
69	Kabupaten Musi Banyuwasin	4,52	A
70	Kota Tasikmalaya	4,52	A
71	Kabupaten Bojonegoro	4,52	A
72	Kabupaten Tanah Laut	4,52	A
73	Kabupaten Blora	4,52	A
74	Kabupaten Sukoharjo	4,52	A
75	Kota Cimahi	4,52	A

3) Penghargaan sebagai UKPBJ Kabupaten/Kota Pertama yang mencapai Level 3 dari Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2022 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Tanah Laut berada pada **Zonasi Hijau** Nilai Kepatuhan **86.61** Kategori **A**

No	Kabupaten	Nilai Kepatuhan	Zonasi	Kategori	Opini
42.	Gunung Kidul	88.97	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Jepara	88.79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Solok	88.73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Dharmasraya	88.67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Kulon Progo	88.61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Tangerang	88.54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Ogan Ilir	88.40	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Semarang	88.27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50.	Banjarnegara	88.20	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51.	Tanah Datar	88.11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52.	Bovolali	88.03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53.	Langkat	87.80	Hijau	B	Kualitas Tinggi
54.	Aceh Selatan	87.74	Hijau	B	Kualitas Tinggi
55.	Tanjung Jabung Timur	87.43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
56.	Kerinci	87.31	Hijau	B	Kualitas Tinggi
57.	Lingga	87.27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
58.	Tapamuli Selatan	87.20	Hijau	B	Kualitas Tinggi
59.	Batu Bera	86.62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
60.	Tanah Laut	86.61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
61.	Banggai	86.11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
62.	Magelang	85.98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
63.	Kepahiang	85.97	Hijau	B	Kualitas Tinggi
64.	Aceh Barat Daya	85.85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
65.	Mamuju Tengah	85.55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
66.	Sanggau	85.52	Hijau	B	Kualitas Tinggi
67.	Seluma	85.51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
68.	Aceh Singkil	85.37	Hijau	B	Kualitas Tinggi
69.	Ngawi	85.36	Hijau	B	Kualitas Tinggi
70.	Nias	85.05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
71.	Klaten	85.00	Hijau	B	Kualitas Tinggi

5) Penghargaan Digital Inovasi Award (DIA) Kategori Digital In
Innovation For Public Service untuk Aplikasi Sosialita

Pelaihari, 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



Drs.H. DAHNIAL KIFLI, MAP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640425 198703 1 012